

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMD

**Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2021**



*Visi 2016-2021:
Terwujudnya Kabupaten Balangan
yang Maju dan Sejahtera
Melalui Pembangunan
Sumber Daya Manusia*

**Pemerintah Kabupaten Balangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Tahun Anggaran 2016**



SAMBUTAN BUPATI BALANGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji - syukur kehadiran Allah SWT serta atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan tepat waktu. Dokumen RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 adalah yang ketiga setelah RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2010 dan 2011-2015.

Ketiga RPJMD tersebut diatas mempunyai saling keterkaitan secara *inherent* yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam naungan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025. Penyusunan RPJMD yang dikawal oleh Bappeda Kabupaten Balangan telah berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Balangan 2005-2025, RTRW Kabupaten Balangan dan mengacu kepada Rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021, serta RPJM Nasional tahun 2015-2019.

Secara mandiri RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 mengandung jiwa dan semangat Visi-Misi Bupati Balangan terpilih untuk periode Tahun 2016-2021. Materi penjabaran Visi-Misi Bupati tersebut juga sudah dimusyawarahkan melalui forum Musrenbang RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 pada tanggal 16 Mei 2016 di Paringin. Dengan telah tersusunnya RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 ini maka **Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Kegiatan serta Indikator Capaian Kinerja** dapat ditetapkan secara lebih *objective* dan *integrative* mencakup seluruh SKPD di Kabupaten Balangan. Pengerahan semua *resources* dengan melibatkan semua *stakeholders* akan dapat lebih mewujudkan keterpaduan guna menciptakan **sinergi**.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat mendukung tersusunnya RPJMD ini, Semoga segala daya upaya kita dapat bermanfaat bagi bangsa, negara, daerah maupun masyarakat Balangan pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Paringin, Juni 2016

Bupati Balangan

Drs. H. Ansharuddin, M.Si

RPJMD
Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2021





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pemerintah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan, baik jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan perencanaan tahunan. Perencanaan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan nasional dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Berkaitan dengan dokumen perencanaan, dalam Pasal 260 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya, pada pasal 263 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dokumen RPJMD adalah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD Kabupaten Balangan 2016-2021 disusun berdasarkan visi, misi, dan agenda pembangunan serta prioritas program pembangunan Bupati/Wakil Bupati, berkedudukan dan sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat Kabupaten Balangan untuk jangka waktu lima tahun dan satu tahun transisi ke depan sebagai upaya untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki dan mengupayakan sumber daya lain (swasta) untuk terlibat di dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang ada dan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. RPJMD Kabupaten Balangan 2016-2021 merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan 2016-2021 dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati/Wakil Bupati ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah disiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

- 2) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD.



Musrenbang RPJMD diselenggarakan oleh Bappeda yang diikuti oleh unsur-unsur pemerintah daerah dan masyarakat, dengan materi Rancangan Awal RPJMD.

3) Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD

Berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD, Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2011- 2015 ini disusun dengan landasan hukum peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan; (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah No.43 Tahun 2008
- 13) Peraturan Daerah kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.03 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah No.02 Tahun 2008;a
- 14) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.

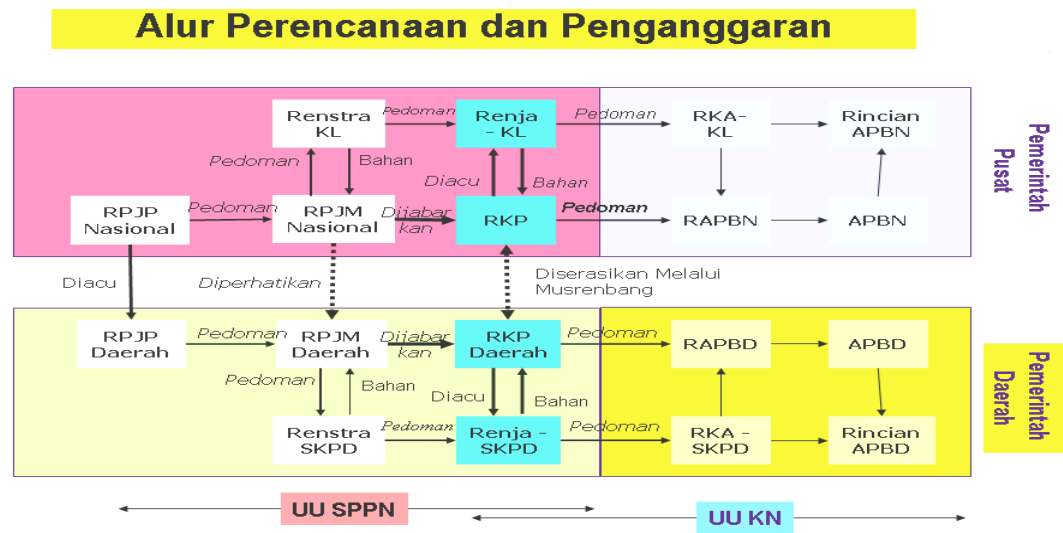
1.3. Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD dan diselaraskan dengan RPJMN 2015-2019. RPJMD menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahun selama periode perencanaan, RPJMD akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan. RKPD tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja SKPD disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD.

Berkaitan dengan sistem keuangan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005, maka penjabaran RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Balangan untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan APBD Kabupaten Balangan.



Gambaran tentang hubungan antara RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1.



Gambar 1.1. Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman resmi dan acuan pelaksanaan pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang dan sekaligus acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Balangan secara berjenjang. Dengan telah tersedianya acuan resmi maka akan mempermudah untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki untuk terlibat di dalam pelaksanaan segenap program dan kegiatan pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 adalah untuk:

1. Menjabarkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2016-2021 ke dalam program prioritas pembangunan daerah dan menjadikannya sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun RKP Daerah.
2. Menjadikan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2016-2021 sebagai bahan acuan penyusunan Renstra SKPD dan bahan evaluasi kinerja SKPD.
3. Membantu jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyelaraskan program kegiatan pembangunan secara terpadu dan terarah serta untuk mengevaluasi pencapaian kegiatan operasional dalam lima tahun ke depan.



1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

**BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN**

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB IX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN



BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

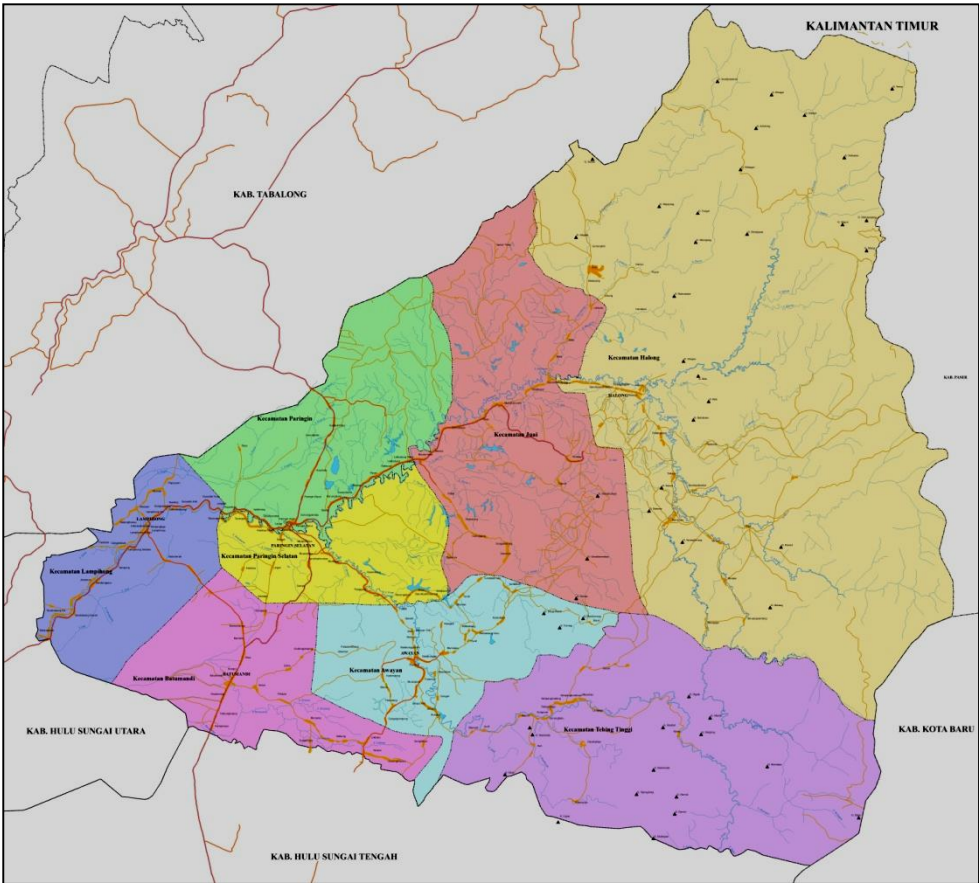
2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Balangan 182.611 ha secara geografis terletak pada 2° 01' 37" sampai dengan 2° 35' 58" Lintang Selatan dan 114° 50' 24" sampai dengan 115° 50' 24" Bujur Timur, dengan batas administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Sebelah Barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Sebelah Timur : Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur



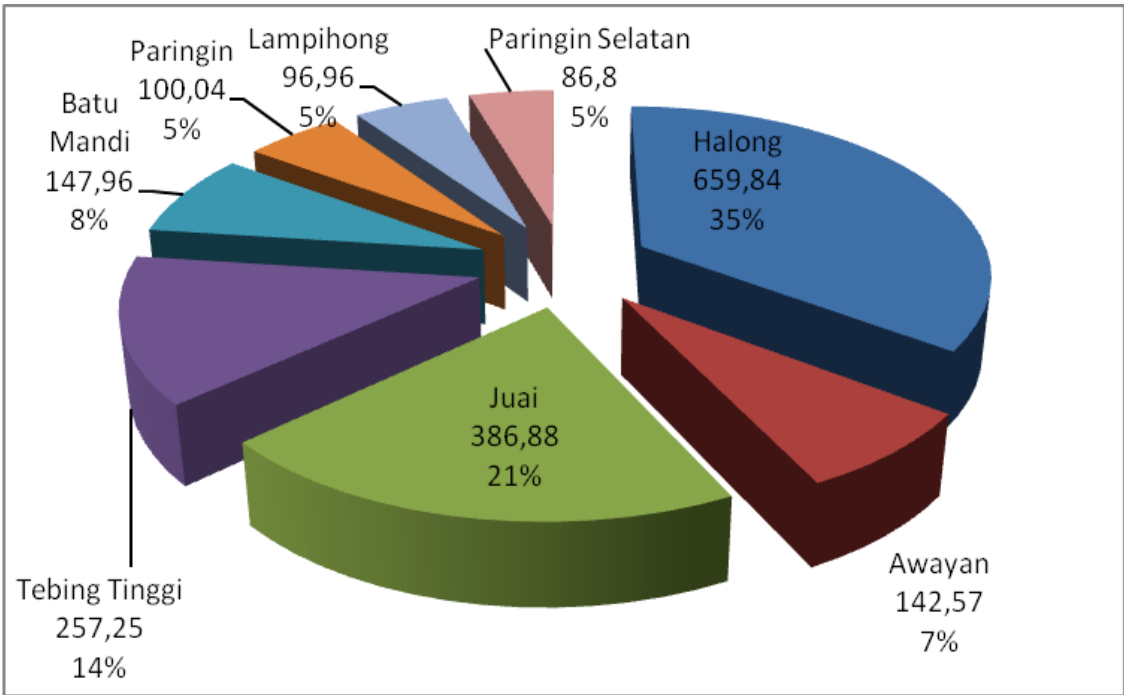
Gambar 2.1 Batas Administrasi Kabupaten Balangan

Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Halong yaitu 659,84 km² (35,13 persen), Kecamatan Juai 386,88 km² (20,59 persen), Kecamatan Tebing Tinggi 257,25 km² (13,70 persen),



Kecamatan Batumandi 147,96 km² (7,88 persen), Kecamatan Awayan 142,57 km² (7,59 persen), Kecamatan Paringin 100,04 km² (5,33 persen), Kecamatan Lampihong 96,96 km² (5,16 persen), dan Kecamatan Paringin Selatan 86,80 km² (4,62 persen). Kabupaten Balangan terdiri atas 149 desadan 3 kelurahan (berdasarkan Perda No. 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur dan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Tabel 2.1. berikut ini

Gambar 2.2. Luas Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Balangan dalam Satuan Km²



Sumber: BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2015

Tabel 2.1.
Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Balangan

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Daerah (Km²)	Kelurahan (Buah)	Desa (Buah)
Lampihong	Simpang Tiga	96,96	-	27
Paringin	Paringin	100,04	2	14
Juai	Mungkur Uyam	386,88	-	21
Halong	Halong	659,84	-	24
Batu Mandi	Batu Mandi	147,96	-	18
Paringin Selatan	Batu Piring	86,80	1	15
Awayan	Putat Basiun	142,57	-	23
Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	257,25	-	12
Jumlah		1.878,30	3	154

Sumber : BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2015



b. Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah kabupaten Balangan terletak antara 2° 02'25,99" sampai dengan 2° 31'57,96" Lintang Selatan dan 115°18'45,03" sampai dengan 115°50'11,70" Bujur Timur. Kabupaten Balangan terbagi menjadi 8 kecamatan, dengan 157 desa/kelurahan.

1) Topografi

Kabupaten Balangan memiliki kondisi topografi yang cukup variatif. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Balangan berada di ketinggian antara 25-100 m dpl (38 persen). Ketinggian yang paling kecil adalah ketinggian 0-7 meter, yaitu hanya 19 persen. Ketinggian 0-7 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi sedangkan ketinggian di atas 500 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Awayan, Tebing Tinggi dan Halong. Wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 meter dpl merupakan wilayah yang jika digunakan untuk budidaya pertanian memerlukan tindakan-tindakan khusus karena pada ketinggian tersebut banyak lereng yang terjal dan mudah erosi. Ketinggian kurang dari 500 meter sangat cocok untuk budidaya pertanian dan harus tetap memperhitungkan bahwa pada ketinggian tersebut juga masih banyak lereng yang terjal.

Kemiringan lahan di Kabupaten Balangan bervariasi dalam enam kelas kemiringan, yaitu < 2 persen, 2-8 persen, 8-15 persen, 15-25 persen, 25-40 persen dan lebih besar dari 40 persen. Hal ini sangat jelas terlihat dari kondisi fisik lingkungan yang cukup bergelombang di beberapa Kecamatan yang merupakan bagian wilayah Kabupaten. Kemiringan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan terhadap erosi tanah. Semakin tinggi/terjal lerengnya, semakin peka terhadap erosi. Kelas lereng paling luas di Kabupaten Balangan adalah kelas lereng 0-2persenyaitu mencapai 69 persendari luas wilayah Kabupaten Balangan yang terdapat di semua kecamatan, dimana yang terbesar terdapat di Kecamatan Halong. Kelas lereng ini sangat cocok untuk budidaya pertanian, maupun untuk kegiatan perkotaan (terbangun).

Kelas lereng yang luasnya paling kecil adalah kelas 25-40m yaitu hanya 2 persen, yang terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Wilayah yang curam dengan kemiringan di atas 40 m cukup luas yaitu mencapai 16 persen dan terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Kawasan yang memiliki kelas lereng tersebut pada umumnya dipertahankan sebagai Kawasan lindung. Perbedaan kondisi kemiringan lahan ini berimplikasi terhadap wilayah yang cukup seragam, sementara Kecamatan yang lain kondisi fisiknya cukup beragam. Kecamatan Lampihong, misalnya, memiliki karakter fisik datar, tanpa wilayah bergelombang. Tidak seperti Kecamatan Awayan dan Halong, yang memiliki semua kelas lereng, mulai dari topografi yang datar hingga kemiringan tajam (terjal).



2) Geologi

Kondisi geologis di salah satu wilayah kabupaten diasumsikan cukup mewakili kondisi geologis lingkup Kawasan tersebut, karena proses ekologi yang terjadi secara alami pada umumnya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang di lingkup wilayah yang cukup luas.

Tinjauan kondisi geologi terdiri dari tinjauan terhadap jenis batuan, jenis tanah dan tekstur tanah yang terdapat di Kabupaten Balangan. Jenis batuan yang ada di Kabupaten Balangan terdiri dari enam jenis, yaitu Paleogen To,b,c,d, batuan beku dalam, Miosen bawah (Aketania Fe), Miosen Tf 1-3, Neopleosin Tf-Tgh, Misozoikum tak diuraikan dan Quarfer. Jenis batuan yang paling luas di Kabupaten Balangan adalah jenis miosen Tf 1-3 yaitu mencapai 71.277 Ha (37,25 persen) dari luas wilayah. Jenis batuan ini terdapat di semua Kecamatan. Sedangkan jenis batuan yang paling sedikit adalah-jenis Paleogen'Ta, b, c, d yang hanya terdapat di Kecamatan Halong.

Untuk jenis tanah yang terdapat di kabupaten Balangan adalah latosol, podsolik merah kuning, kompleks podsolik merah kuning dan latosol, litosol, serta alluvial. Jenis tanah yang mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah tanah alluvial yang sangat potensial unfuk budidaya pertanian karena disamping subur juga tidak peka terhadap erosi.Jenis tanah yang lain mempunyai tingkat kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi disertai teknologi pengolahan tanah yang tepat, sehingga erosi dapat ditekan sekecil mungkin.Jenis tanah yang terbanyak adalah podsolik merah kuning, yaitu mencapai 78.723 Ha (42,73 persen), sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah latosol, yaitu hanya 4.491 Ha (2,44 persen). Luas tanah alluvial hanya mencapai 6.703 Ha (3,64 persen). Tanah aluvial paling banyak terdapat di Kecamatan Halong dan paling sedikit di Kecamatan Juai. Jenis tanah alluvial ini tidak terdapat di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Awayan dan Paringin.

Tekstur tanah diKabupaten Balangan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu halus, sedang, dan kasar. Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi. Sebagian besar tanah di Kabupaten Balangan bertekstur halus, yaitu mencapai 91,76 persen dari luas wilayah. Tanah yang bertekstur sedang dan kasar hanya 6,98 persen dan 1,26 persen dari luas wilayah. Lahan bertekstur halus paling banyak terdapat di Kecamatan Halong. Dengan demikian di Kabupaten Balangan tersedia lahan yang cukup luas untuk ditanami semua tanaman dengan baik dan tahan terhadap erosi.

3) Hidrologi

Kondisi Hidrologi dapat ditinjau dari beberapa hal, diantaranya kondisi sumberdaya air dan pola drainase. Sumber daya air di Kabupaten Balangan berupa sungai dan embung (kolam-kolam retensi).Sungai-sungai utama yang mengalir didaerah Kabupaten Balangan adalah sungai Pitap, sungai



Balangan, sungai Mantuyan, sungai Tabuan, sungai Galumbang, sungai Halong, sungai Uren, sungai Ninian, sungai Jauk, sungai Batumandi, sungai Lokbatu dan sungai Juai. Berdasarkan pola pengaliran sungai utama dan anak sungai, maka daerah Kabupaten Balangan dibagi menjadi 4 pola pengaliran sungai, yaitu : pola pengaliran anastomatik, pola pengaliran dendritik, pola pengaliran rektangular dan pola pengaliran subdendritik.

a) ***Pola Pengaliran Anastomatik***

Pola pengaliran anastomatik adalah pola pengaliran modifikasi yang membentuk meander yang terbentuk di dataran banjir, delta ataupun rawa. Pola pengaliran ini menempati daerah kabupaten Balangan dengan luas kira-kira 25 persen. Pola pengaliran ini terdapat dibagian barat-selatan daerah kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Pitap, sungai Muning, sungai Lok Batu, sungai Juuh, sungai Batumandi, sungai Jauk, sungai Pelasan serta sungai Kambiyain dengan anak-anak sungainya

b) ***Pola Pengaliran Dendritik***

Pola pengaliran dendritik adalah pola pengaliran dasar yang bentuk umum seperti daun, berkembang pada batuan dengan kekerasan relatif sama, perlapisan batuan sedimen relatif datar serta tahan akan pelapukan, kemiringan landai, kurang dipengaruhi struktur geologi, pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten Balangan sekitar 25 persen. Pola Pengaliran ini terdapat di bagian barat hingga bagian tengah daerah kabupaten Balangan. Pola Pengaliran ini terdapat di sungai Balangan, sungai Ninian, sungai Juai, sungai Jungkal serta sungai Jingan dengan anak-anak sungainya

c) ***Pola Pengaliran Rektangular***

Pola pengaliran rekrangular adalah pola pengaliran dasar dimana induk sungai dengan anak sungai yang memperlihatkan arah lengkungan menganan, pengontrol struktur atau sesar yang memiliki sudut kemiringan, tidak memiliki perulangan perlapisan batuan dan sering memperlihatkan pola.

Pengaliran yang tidak menerus. Pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten Balangan sekitar 30 persen. Pola pengaliran terdapat dibagian timur daerah Kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Balangan, sungai Balong, sungai Uren, sungai Mantuyan, serta sungai Tabuan dengan anak-anak sungainya

d) ***Pola Pengaliran Subdendritik***

Pola pengaliran subdendritik adalah pola pengaliran modifikasi yang berbentuk mendaun yang umumnya terbentuk didaerah yang mempunyai kekerasan batuan relative sama yang berkembang pada batuan beku, sedimen, maupun metamorf. Pola pengaliran ini menempati daerah kabupaten balangan sekitar 20 persen. Pola pengaliran ini terdapat dibagian utara daerah Kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Galumbang, sungai Lalayau serta sungai Tutupan dengan anak-anak sungainya.

4) Klimatologi

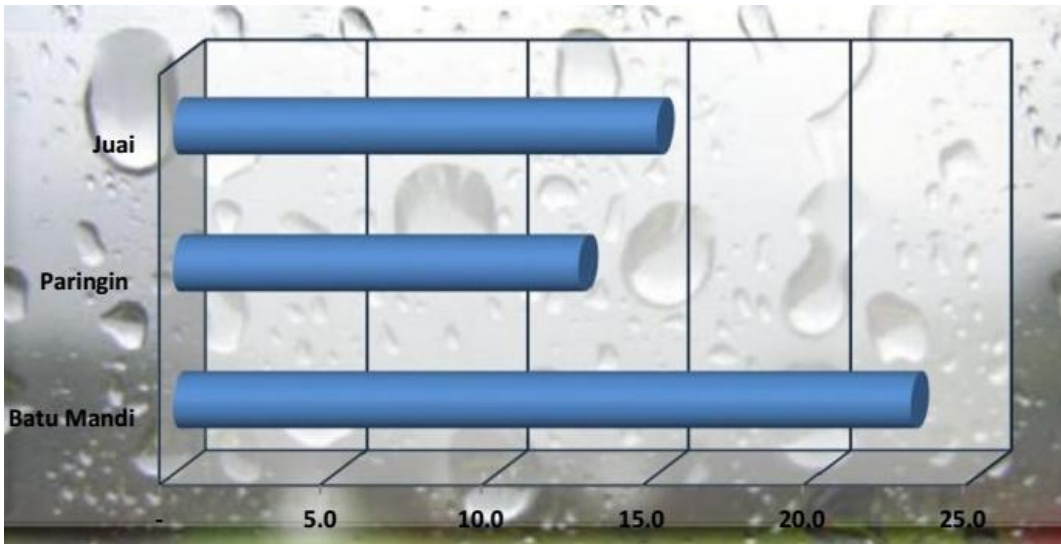
Keadaan iklim di Kalimantan Selatan menurut Sistem Koppen dapat digolongkan kedalam iklim hutan tropika humid dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2000 mm hingga 3000 mm, curah hujan terendah jatuh sekitar bulan Juni, Juli, Agustus dan September, sedangkan curah hujan tertinggi jatuh sekitar bulan Desember, Januari, Februari dan Maret.



Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim dan perputaran arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Masing-masing memiliki angka yang berbeda. Dilihat dari 3 (tiga) stasiun pengamatan yang terdapat di Kabupaten Balangan, yaitu Paringin, Batu Mandi dan Juai, rata-rata curah hujan per hari pada tahun 2015 di Kabupaten Balangan sebesar 16,5 mm dengan rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 117,7 hari atau sekitar lebih dari 3 bulan. Hari hujan terbanyak sepanjang tahun 2014 interpetasi di stasiun pengamatan Juai yaitu pada bulan Desember dengan 25 hari hujan dalam sebulan.

Gambar 2.3

Rata-Rata Curah Hujan/hari Menurut Stasiun Pengamatan (mm), 2015



5) Penggunaan Lahan

Persentase penggunaan lahan di Kabupaten Balangan belum mengalami perubahan yang begitu signifikan, dengan dominasi penggunaan lahan adalah berupa kegiatan untuk tanah perkebunan 29persen, tanah bukan sawah 25 persen, hutan negara 21 persen, dan tanah sawah 18persen. Dengan dominasi perkebunan dan persawahan pada penggunaan lahannya, kabupaten balangan dapat dikatakan memiliki lahan terbuka (tidak terbangun) yang relatif besar, dibandingkan dengan lahan yang terbangun. Perubahan yang cukup signifikan terutama terjadi pada kegiatan sawah, hutan, serta kegiatan lain-lain. Hal ini dimungkinkan dengan bertambahnya jumlah penduduk akibat migrasi dan kelahiran. Konsentrasi lahan terbangun yang tertinggi dapat ditemukan di pusat Ibukota Kabupaten Balangan, dan disepanjang jalan berupa perumahan penduduk, sementara dominasi hutan dimaksud bukan lagi hutan murni yang belum terjamah, melainkan berupa hutan karet yang cukup padat. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4

Luas Wilayah Balangan Menurut Penggunaan



Sumber : BPS Kabupaten Balangan Tahun 2015

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Balangan memiliki beberapa sektor unggulan daerah yaitu di sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor pariwisata.

a. Sektor Pertanian

1) Tanaman Pangan:

- *Padi Gogo* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Halong dan Kecamatan Awayan.
- *Pisang Talas* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Halong & Kecamatan Awayan

2) Sayuran:

- *Labu/Waluh* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Juai dan Kecamatan Awayan.
- *Cabe Rawit* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Awayan dan Kecamatan Halong.

3) Buah-buahan:

- *Cempedak* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Halong.



- *Maritim* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Awayan, Kecamatan Juai dan Kecamatan Batumandi.
- 4) Perkebunan:
- *Karet* dengan lokasi prioritas Kecamatan Awayan.
 - *Sawit* dengan lokasi prioritas di Kecamatan Juai, Lampihong dan Batu Mandi
 - *Gula Arendengan* lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Awayan.
- 5) Peternakan:
- *Ayam Buras* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Paringin, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong.
 - *Sapi Potong* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Awayan, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong.

Untuk lebih jelasnya data mengenai pengembangan pertanian di Kabupaten Balangan dari Tahun 2013 sampai tahun 2015 dapat dilihat pada beberapa tabel berikut.

Tabel 2.3. Data Luas Areal dan Produksi Pertanian Tanaman Pangan

Jenis Data Pertanian	Tahun			Ket
	2013	2014	2015	
a. Padi				
- Luas areal produksi	32.743	32.930	34.914	Ha
- Jumlah Produksi	135.265,34	136.331,16	157.116	Ton
-				
b. Jagung				
- Luas areal produksi	448	472	1.121	Ha
- Jumlah Produksi	1.570,29	1.703,60	5.044,7	Ton
-				
c. Kedelai				
- Luas areal produksi	560	502	799	Ha
- Jumlah Produksi	728,18	657,62	959	Ton
-				
d. Singkong dan Umbi-umbian				
- Luas areal produksi	263	325	300	Ha
- Jumlah Produksi	3.529,64	4.254,59	4.070	Ton
-				

Sumber: DisPTPHPP Balangan Tahun 2016



Tabel 2.4. Data Luas Areal dan Produksi Perkebunan

Jenis Data Perkebunan	Tahun			Ket
	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5
a. Karet				
- Luas areal	37.345	37.495	37.495	Ha
- Jumlah Produksi	25.107	25,268	24,959	Ton
b. Kelapa				
- Luas areal	891	816	816	Ha
- Jumlah Produksi	322	231	244	Ton
c. Kopi				
- Luas areal	652	630	630	Ha
- Jumlah Produksi	32	29	51	Ton
d. Sawit / Perkebunan Rakyat				
- Luas areal	200	200	356	Ha
- Jumlah Produksi	233	244	258	Ton
e. Sawit / Perkebunan Besar Swasta				
- Luas areal	1700	1700	1700	Ha
- Jumlah Produksi	5048	5950	6399	Ton
f. Kapuk				
- Luas areal	20	20	20	Ha
- Jumlah Produksi	1	2	3	Ton
g. Kemiri				
- Luas areal	208	208	204	Ha
- Jumlah Produksi	70	71	72	Ton
h. Lada				
- Luas areal	10	10	10	Ha
- Jumlah Produksi	4	2	2	Ton
i. Pinang				
- Luas areal	41	41	41	Ha
- Jumlah Produksi	3	4	5	Ton
j. Asen/Enau				
- Luas areal	733	734	727	Ha
- Jumlah Produksi	391	360	422	Kg
k. Jahe				
- Luas areal	-	-	-	Ha
- Jumlah Produksi	-	-	-	Ton
l. Sagu				
- Luas areal	426	426	426	Ha
- Jumlah Produksi	51	49	76	Ton

Sumber: DisPTPHPP Balangan Tahun 2016



Tabel 2.5. Data Luas Areal dan Produksi Peternakan

Jenis Data Peternakan	Tahun			Ket
	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5
a. Ternak Sapi Potong				
- Jumlah populasi	2.334	1.766	2.017	Ekor
- Jumlah Produksi (daging)	192.563	215.799	216.673	Kg
- Jumlah pemotongan/th	975	988	988	Ekor
- Jumlah pertumbuhan populasi per tahun				%
- Harga produsen (kg bh)		105.000	105.000	Rp.
- Harga konsumen (kg)		115.000	115.000	Rp.
b. Ternak kecil				
- Jumlah populasi kambing	2.028	655	675	Ekor
✚ Jumlah Produksi (daging)	8.475	10.789	10.889	Kg
✚ Harga produsen (kg bh)		70.000	70.000	Rp.
✚ Harga konsumen (kg)		90.000	90.000	Rp.
- Jumlah populasi domba	14			Ekor
✚ Jumlah Produksi (daging)	363	153	153	Kg
✚ Harga produsen (kg bh)		70.000	70.000	Rp.
✚ Harga konsumen (kg)		90.000	90.000	Rp.
c. Unggas				
- Ayam buras				
✚ Jumlah populasi	20.554	57.815	71.128	Ekor
✚ Jumlah produksi (daging)	558.264	296.176	343	Kg
✚ Jumlah produksi (telur)	67.955	47.303	58.196	Kg
✚ Harga produsen (kg bh)		38.000	38.000	Rp.
✚ Harga konsumen (kg)		45.000	45.000	Rp.
- Ayam pedaging				
✚ Jumlah populasi	279.600	1.094.842	1.094.842	Ekor/th
✚ Jumlah produksi (daging)			560.896	Kg
✚ Harga produsen (kg bh)		29.000	29.000	Rp.
✚ Harga konsumen (kg)		35.000	35.000	Rp.
- Itik				
✚ Jumlah populasi	70.833	626.801	30.194	Ekor/th
✚ Jumlah produksi (daging)	47.368	49.481	67.235	Ton
✚ Jumlah produksi (telur)	502.793	183.778	207.045	Butir/th
✚ Harga produsen (kg bh)		40.000	40.000	Rp.
✚ Harga konsumen (kg)		50.000	50.000	Rp.
d. Jumlah rumah potong hewan (RPH)	1	1	1	Bh

Sumber: DisPTPHPP Balangan Tahun 2016



Tabel 2.6. Data Luas Areal dan Produksi Kehutanan

Jenis Data Kehutanan	Tahun			Ket
	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5
a. Hasil hutan non HPH				
- Kayu bulat	-	-	-	M ³
- Kayu penggergajian	-	-	-	M ³
- Kayu olahan				M ³
b. Luas lahan kritis	41.920,5	18.892,3	-	Ha
c. Luas lahan reboisasi	1.812	24.840,2	-	Ha
d. Luas lahan penghijauan				Ha
e. Luas kebakaran hutan			37	Titik Hotspot
f. Industri pengolahan hasil hutan	2	1	1	Bh

Sumber: Dishutbun Balangan Tahun 2016

b. Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan, sejak tahun 1992 Kabupaten Balangan merupakan salah satu daerah penghasil batu bara yang mempunyai kontribusi cukup besar terhadap ekspor batu bara di Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil pemetaan neraca Sumber Daya Alam, Kabupaten Balangan memiliki potensi batubara yang tersebar di beberapa kecamatan terutama di Kecamatan Paringin, Tebing Tinggi, Halong, Juai, Awayan dan Batu Mandi.

c. Sektor Pariwisata

Di Kabupaten Balangan banyak terdapat objek wisata alam yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu :

- 1) Kecamatan Awayan
 - Benteng Tundakan
- 2) Kecamatan Paringin Selatan
 - Danau Baruh Bahinu Dalam, dimana lokasi objek wisata ini pernah ditayangkan melalui acara Jejak Petulangan yang dilaksanakan oleh Trans TV.
- 3) Kecamatan Halong
 - Air Terjun Manyandar
 - Goa Berangin Gunung Belawan
- 4) Kecamatan Juai
 - Makam Datu Kandang Haji

Objek Wisata ini merupakan Objek Wisata Religius, dimana Datu Kandang Haji merupakan tokoh penyebar Agama Islam di Kabupaten Balangan
- 5) Kecamatan Tebing Tinggi
 - Gunung Hantanung Permai



2.1.3. Struktur dan Pola Ruang

1) Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan di Indonesia umumnya memiliki karakteristik urban (perkotaan) dan rural (perdesaan) yang saling berkaitan. Kondisi tersebut juga terjadi di wilayah perencanaan, berdasar pada karakteristik Kabupaten Balangan tersebut maka perlu untuk dilakukan arahan sistem penetapan kawasan perdesaan dan perkotaan agar kegiatan perkotaan dan perdesaan di wilayah perencanaan dapat saling bersinergi sehingga disparitas pertumbuhan wilayah perdesaan dan perkotaan dapat tereliminir.

Sistem penetapan kawasan perkotaan dan perdesaan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan ini menggunakan pendekatan teoritis dan konseptual yang dikemukakan oleh beberapa ahli tata ruang. Berikut akan dipaparkan konsep-konsep serta teori yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan kawasan perdesaan dan perkotaan di wilayah perencanaan.

a). Kawasan Perdesaan

Perdesaan merupakan suatu bagian wilayah yang tidak berdiri sendiri. Suatu wilayah bisa disebut perdesaan karena mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan perkotaan. Pengertian desa menurut Kamus Tata Ruang (1997) adalah permukiman kecil di luar kota, jumlah penduduknya terbatas, luas daerah geografisnya terbatas, kepadatan penduduk rendah, berpola hubungan tradisional, mata pencaharian utama dibidang pertanian.

Dalam pengembangan wilayah, kawasan perdesaan harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan perkotaan. Pemahaman yang menyeluruh dan tidak otomatis ini menjadi penting dan mendasar dalam penyusunan peraturan atau aturan main yang berkaitan dengan perdesaan maupun perkotaan, agar terjadi sinergi dan keseimbangan perlakuan wilayah, khususnya oleh pelaku pembangunan.

b). Kawasan Perkotaan

Menurut Draft RPP pengelolaan dan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan (2001), pengertian Kota adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah bercirikan perkotaan, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kota menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasar hasil kajian dengan menggunakan pendekatan konsep dan teori mengenai kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan diatas, maka ditetapkan kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Balangan sebagai berikut.

- Kawasan perkotaan ditetapkan adalah perkotaan Paringin.
- IKK pada masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Balangan.



- Kawasan perdesaan adalah seluruh wilayah administrasi desa di Kabupaten Balangan, selain dari wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan perkotaan.

2) Sistem Perdesaan

Arahan pengembangan sistem perdesaan adalah penataan struktur ruang perdesaan sebagai sistem pusat kegiatan di perdesaan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di perdesaan. Sistem pusat kegiatan di desa pusat pertumbuhan secara spasial sudah dapat dikembangkan dalam *subcluster of services*, dengan infrastruktur/kegiatan pelayanan yang dikembangkan antara lain pelayanan kegiatan finansial seperti kantor kas, kegiatan perdagangan dalam bentuk kawasan pertokoan yang dapat melayani wilayah yang lebih luas. Permukiman disekitar pusat desa dapat dikembangkan dalam sistem cluster, sehingga tidak mengganggu lahan pertanian yang ada disekitarnya. Intensitas kegiatan dikelola dalam perpektif pemberdayaan kegiatan ekonomi lokal yang terintegrasi dengan kawasan produksi di sekitarnya ataupun di desa lain yang secara struktural menjadi wilayah belakang yang dilayani oleh pusat kegiatan desa ini.

Pengelolaan struktur ruang perdesaan merupakan upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan di kawasan perdesaan. Pengelolaan sistem perdesaan di Kabupaten Balangan akan dikembangkan dengan konsep pengembangan desa-desa agropolis. Pengembangan desa agropolis secara struktural akan terkait pula dengan pengembangan interaksi desa-kota, dan membuat keterkaitan antar pusat-pusat permukiman tersebut dalam pola sistem jaringan (*network system*), sesuai dengan konsep penataan struktur tata ruang wilayah Kabupaten Balangan dan pola pengembangan kegiatan ekonomi lokal yang diarahkan dapat memicu perkembangan wilayah yang berbasis pada sektor primer.

Arahan pengembangan struktur ruang perdesaan melalui:

- Pembentukan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP).
- Pembentukan Pusat Desa.
- Pembentukan Pusat Permukiman Perdusunan.

Pengembangan sistem perdesaan dibedakan atas tipologi kegiatan yang akan dikembangkan, yaitu pengembangan sistem pusat permukiman pada:

- Desa pertanian.
- Desa industri.
- Desa wisata.



Desa-desa pertanian secara umum akan berada pada kawasan dengan karakter rural murni dengan kegiatan murni produksi pertanian (sektor basis). Sehingga pada desa pertanian sistem pusat permukiman akan berkembang untuk skala unit desa. Fungsi pusat permukiman pada desa pertanian diarahkan untuk pelayanan permukiman yang menyebar di sekitar daerah pertanian (*farm village type*). Maka pada kawasan tersebut dapat difungsikan sebagai pusat permukiman pada desa pertanian, berupa pusat pelayanan pemerintahan, pengembangan pasar/perdagangan skala desa, pelayanan kesehatan setara puskesmas/puskesmas pembantu.

Desa industri dimungkinkan akan berkembang dengan kegiatan industri berbasis pertanian. Desa industri ini lebih prospektif dikembangkan untuk menjadi desa pusat pertumbuhan. Sistem pusat permukiman diarahkan dapat melayani skala beberapa pusat permukiman desa pertanian. Sehingga secara hirarki pusat permukiman desa industri lebih tinggi dari pusat permukiman di desa pertanian murni.

Pusat-pusat permukiman di desa industri diarahkan terhubung satu dengan yang lainnya, dan secara struktural diarahkan berinteraksi kuat dengan kota-kota kecil atau besar di sekitarnya. Pusat permukiman di desa yang dimungkinkan dikembangkan kegiatan industri pengolahan pertanian, juga diarahkan untuk dikembangkan kegiatan perdagangan dan sebagai pusat koleksi hasil produksi dari berbagai desa pertanian yang ada disekitarnya. Setiap pusat pelayanan dikembangkan melalui penyediaan berbagai fasilitas sosial-ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan.

Desa pusat pertumbuhan dimungkinkan mempunyai konsentrasi penduduk dan kegiatan budaya non pertanian yang lebih intensif dari sistem permukiman di desa pertanian. Pola pengembangan pusat permukiman desa pertanian dengan pusat permukiman diupayakan sinergi dan berimbang dengan pola pemanfaatan lahan.

Desa wisata kedepan merupakan kawasan perdesaan yang sangat potensial untuk berkembang dan dikembangkan di wilayah perencanaan, mengingat potensi sektor pariwisata yang dimiliki di wilayah perencanaan cukup besar. Pengembangan desa wisata diharapkan dapat saling bersinergi dan berinteraksi dengan desa pertanian dan desa industri, baik secara spasial dan khususnya secara ekonomi.

3). Sistem Perkotaan

Dalam Sistem Perkotaan, didalam RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, mengarahkan Kota Paringin sebagai PKL. Kota Paringin sebagai PKL harus memenuhi kriteria :

- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten dan atau beberapa kecamatan.



- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten dan atau beberapa kecamatan.

Kawasan Perkotaan Paringin, meliputi perkotaan secara fungsional, yaitu Kelurahan Paringin Kota dan Kelurahan Paringin Timur di Kecamatan Paringin, dan Kelurahan Batu Piring di Kelurahan Paringin Selatan.

Kawasan Perkotaan Batumandi meliputi Desa Batumandi dan Desa Teluk Mesjid di Kecamatan Batumandi merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yang dipromosikan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp).

Tabel 2.7
Sistem Perkotaan Perdesaan di Kabupaten Balangan

Peran	Perkotaan
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Paringin (Kecamatan Paringin dan Kecamatan Paringin Selatan)
Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)	Batumandi (Kecamatan Batumandi)
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	1. Muara Pitap berada di Kecamatan Paringin Selatan 2. Simpang Tiga berada di Kecamatan Lampihong 3. Putat Basiun berada di Kecamatan Awayan 4. Tebing Tinggi berada di Kecamatan Tebing Tinggi 5. Mungkur Uyam berada di Kecamatan Juai 6. Halong berada di Kecamatan Halong
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	1. Mantimin berada di Kecamatan Batumandi 2. Pudak berada di Kecamatan Awayan 3. Bihara berada di Kecamatan Awayan 4. Tabuan berada di Kecamatan Halong 5. Mauya berada di Kecamatan Halong 6. Haur Batu berada di Kecamatan Paringin 7. Gunung Pandau berada di Kecamatan Paringin Selatan 8. Layap berada di Kecamatan Paringin 9. Bungin berada di Kecamatan Paringin Selatan

Sumber : RTRW Kab. Balangan Tahun 2014



2.1.4. Rencana Kawasan Lindung

Kawasan lindung menurut Keppres No. 32/1990, adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam, kawasan suaka laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, dan kawasan rawan bencana. Berdasarkan Kemenhut No.453/Kpts-II/1999 Kawasan Hutan di Kab. Balangan seluas 90.643 Ha yang terdiri atas HL = 51.938 Ha; HP = 31.195 Ha; dan HPT = 7.510 Ha. Dan jika berdasarkan Kemenhut No.435/Kpts-II/2009 Kawasan Hutan di Kab. Balangan seluas 90.373 Ha yang terdiri atas HL = 65.791 Ha; HP = 24.568 Ha; dan HPT = 24 Ha.

Sedangkan jika berdasarkan interpretasi citra satelit pada tahun 2007 Wilayah Kawasan Lindung di Kabupaten Balangan berdasarkan daerah limitasi yang meliputi 77.840,77 ha atau sekitar 41,44persen dari keseluruhan luas Kabupaten Balangan. Kawasan Lindung di Kabupaten Balangan tersebar di seluruh bagian Kabupaten Balangan meliputi Hutan Lindung, Sempadan Sungai, Rawan Banjir, dan Rawan Longsor di Kecamatan Awayan 18.698,7 (24 persen); Kecamatan Batu Mandi 766,8 (0,9 persen); Kecamatan Halong 41.676,9 (53,5 persen); Kecamatan Juai 5.254,7 (6,7 persen); Kecamatan Lampihong 3.345,2 (4,3 persen); Kecamatan Paringin Selatan 3.836,7 (4,9 persen); Kecamatan Paringin 3.143,3 (4 persen); dan Kecamatan Tebing Tinggi 1.118,2 (1,4 persen).

2.1.5. Rencana Kawasan Budidaya

Pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya di Kabupaten Balangan masih tetap memperhatikan kecenderungan pemanfaatan ruang saat ini. Berdasarkan interpretasi citra satelit pada tahun 2007 rencana kawasan budidaya di Kabupaten Balangan sebesar 109.989,23 ha atau sebesar 58,56 persen, yang tersebar diseluruh daerah di Kabupaten Balangan. Adapun sebaran kawasan budidaya meliputi Kecamatan Awayan 11.162 Ha (10 persen); Kecamatan Batu Mandi 10.519 Ha (9,56 persen); Kecamatan Halong 31.553 Ha (28,69 persen); Kecamatan Juai 17.546 Ha (15,95 persen); Kecamatan Lampihong 7.895 (7,18 persen); Kecamatan Paringin Selatan 6.539 Ha (5,59 persen); dan Kecamatan Paringin 11.073 Ha (10,07 persen) dan Kecamatan Tebing Tinggi 13.698 Ha (12,45 persen).

Perwujudan pola ruang kawasan budidaya dalam RTRW Kabupaten Balangan adalah meliputi Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pertanian, Kawasan Perkebunan/Tanaman Tahunan, Kawasan Peternakan dan Perikanan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Pariwisata dan Kawasan Permukiman.

2.1.6. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana tanah longsor berada di Bagian utara timur Kabupaten Balangan yang berbatasan dengan Kalimantan Timur yaitu Kecamatan Halong, Kecamatan Tebing Tinggi dan



Kecamatan Awayan, potensi dapat terjadi pada sekitar daerah kemiringan lereng 25-40 persen dan lebih dari 40 persen dengan ketinggian 500 mdpl. Faktor yang mempengaruhi proses gerakan tanah adalah kemiringan lereng yang curam sehingga memiliki lereng yang rendah, curah hujan yang tinggi pada suatu daerah, gravitasi, vegetasi dan daya dukung tanah yang rendah atau lemah yang dimiliki oleh batuan atau tanah, dan struktur geologi yang berkembang di daerah Kabupaten Balangan. Faktor ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan menentukan besar dan luasnya gerakan tanah. Berdasarkan tipe gerakan tanah dan jenis materialnya dapat dibagi menjadi longsor mendatar dan jatuhnya batuan.

Potensi rawan bencana lainnya adalah banjir yang berada pada areal sektor sungai Balangan dan sungai Pitap yakni sekitar kecamatan Lampihong, Paringin dan kecamatan Juai. Bencana banjir terjadi akibat dari beberapa faktor, hal ini berkaitan dengan jumlah curah hujan yang terjadi dengan daya tampung dari akuifer dan cekungan-cekungan ataupun alur sungai yang ada di daerah kabupaten Balangan. Akumulasi air hujan yang lebih besar dari kapasitas tampungan akan mengakibatkan banjir. Kapasitas tampung yang kurang disebabkan porositas yang buruk pada batuan setempat, berkurangnya vegetasi akibat pengebangan hutan yang kurang terencana dan terkendali ataupun bencana kebakaran dan semakin dangkalnya cekungan ataupun alur sungai akibat proses sedimentasi.

2.1.7. Demografi

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan jumlah penduduk Kabupaten Balangan pada tahun 2012 adalah sebesar 151.875 jiwa. Angka ini terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 114.009 jiwa, yang terdiri dari 31.587 rumah tangga yang tersebar di 152 Desa/Kelurahan. Kabupaten dengan luas wilayah 1.878,30 km² ini memiliki kepadatan penduduk (*population density*) 62 jiwa per km². Dari total penduduk yang ada, sebanyak 76.502 laki-laki dan 75.373 perempuan, dengan sebarannya hampir merata di masing-masing kecamatan, terbanyak terdapat di Kecamatan Halong yaitu 26.339 jiwa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi yaitu 9.056 jiwa. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.8. dan Tabel 2.9.



Tabel 2.8.
**Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Rumah Tangga
Dan Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan Tahun 2015**

Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah/total		
		Desa/Kel.	Rumah tangga	Penduduk
1. Lampihong	96,96	27	5.130	16.944
2. Batumandi	147,96	18	5.363	17.418
3. Awayan	142,57	23	4.245	13.939
4. Tebing Tinggi	257,25	12	1.881	6.280
5. Paringin	100,04	16	5.349	17.614
6. Paringin Selatan	86,80	16	3.822	12.515
7. Juai	386,88	21	5.209	17.392
8. Halong	659,84	24	6.433	21.393
Jumlah	1.878,30	157	37.432	123.495

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2016

Tabel 2.9.
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2014-2015

Kecamatan	Jenis Kelamin				Jumlah Penduduk		Rasio Jenis	
	Laki-laki		Perempuan				Kelamin	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
1. Lampihong	9.013	8,568	8,896	8,376	17,927	16,944	102	102
2. Batumandi	9.148	8,877	8,836	8,541	17,984	17,418	104	104
3. Awayan	6.706	6,944	6,743	6,995	13,449	13,939	99	99
4. Tebing Tinggi	3.462	3,206	3,348	3,074	6,810	6,280	103	104
5. Paringin	8.956	8,790	8,998	8,824	17,954	17,614	100	100
6. Paringin Selatan	6.467	6,294	6,399	6,221	12,866	12,515	101	101
7. Juai	8.448	8,815	8,261	8,577	16,709	17,392	102	103
8. Halong	9.394	10,985	8,951	10,408	18,345	21,393	105	106
Jumlah	76.502	62.479	60,432	61,016	122,044	123,495	102	102

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2016



2.2. Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Makro Ekonomi Balangan

Struktur ekonomi suatu wilayah adalah gambaran bagaimana sektor-sektor perekonomian yang ada di wilayah tersebut dalam membentuk kekuatan yang mendorong laju perekonomian. Kontribusi yang terbentuk dari setiap sektor dalam pembentukan nilai tambah akan membentuk struktur ekonomi, sehingga dari komposisi itu akan diketahui potensi, dominasi, andalan, serta hasil pembangunan maupun perubahan yang diakibatkan adanya kebijakan pemerintah.

Keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan salah satunya di bidang ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi pada dasarnya mengoptimalkan peran sumber daya alam dalam menciptakan kenaikan pendapatan yang terakumulasi pada kategori-kategori lapangan usaha ekonomi, dan tercermin pada besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi per tahun. Pencapaian pertumbuhan ekonomi ini sangat tergantung pada kemampuan daerah dalam membersayakan sumber-sumber alam dan manusia di daerah.

Salah satu kegunaan angka nominal PDRB adalah untuk melihat kinerja perekonomian suatu daerah. Nilai PDRB yang cukup tinggi menunjukkan kinerja perekonomian daerah tersebut cukup berhasil serta memiliki potensi sumber daya yang cukup tinggi karena ketersediaan faktor produksi yang melimpah atau karena efisiensi pengelolaan faktor produksi. Untuk melihat kinerja perekonomian masing-masing kabupaten /kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel 2.10.



Tabel 2.10 PDRB Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas Tahun 2012-2014^{}) (Milyar Rupiah)**

Kabupaten/Kota	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{**})
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah laut	8.728,97	9.408,81	10.468,87
Kotabaru	14.219,69	15.413,64	17.568,54
Banjar	9.518,02	10.303,11	11.773,47
Barito Kuala	4.534,37	4.909,48	5.663,51
Tapin	5.051,45	5.469,08	6.235,04
Hulu Sungai Selatan	3.446,19	3.804,87	4.381,22
Hulu Sungai Tengah	3.627,37	3.996,40	4.580,30
Hulu Sungai Utara	2.526,36	2.784,05	3.246,59
Tabalong	12.921,94	13.851,64	15.246,18
Tanah Bumbu	13.422,18	14.262,07	15.767,82
Balangan	7.887,84	8.713,74	9.702,66
Banjarmasin	16.177,22	17.954,96	20.943,74
Banjarbaru	4.366,55	4.951,50	5.822,75
Kalimantan Selatan	106.725,43	115.876,46	131.592,89

Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB tahun 2010-2014

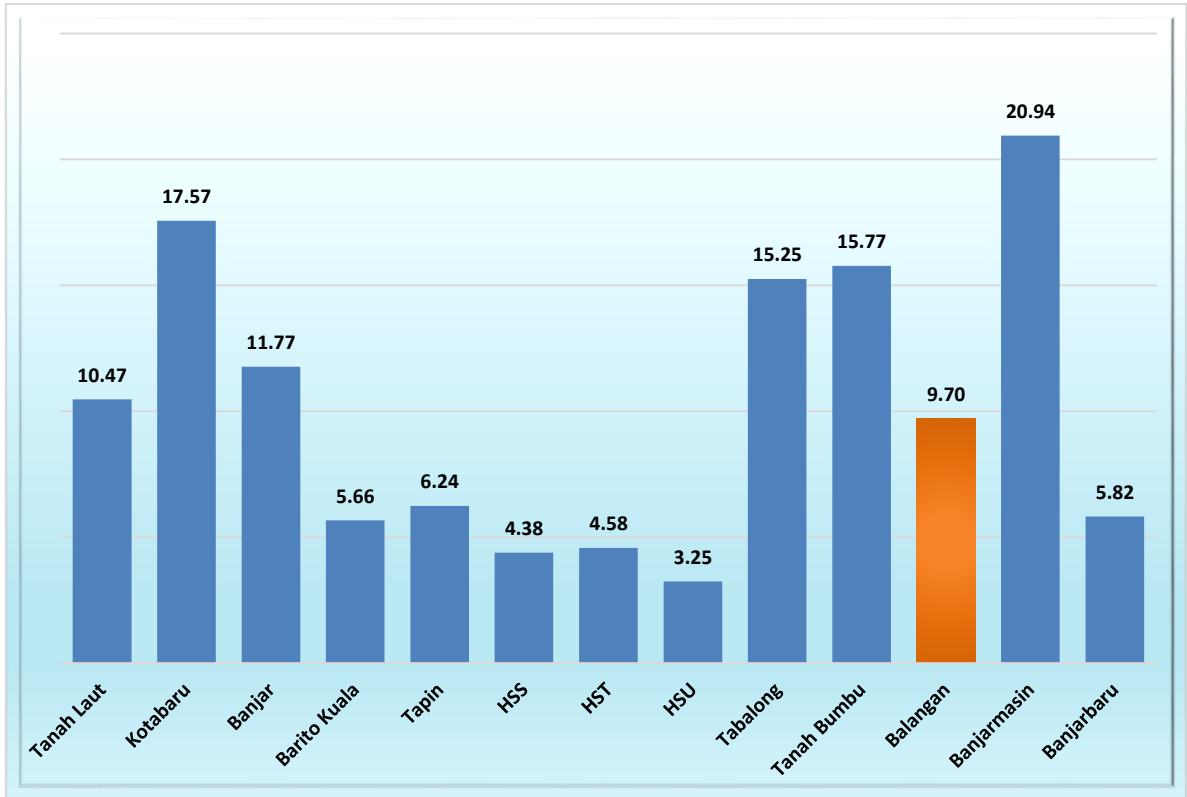
^{*)}Angka Sementara

^{**})Angka Sangat Sementara

Dari beberapa faktor produksi yang tersedia, modal luas wilayah (lahan) dan ketersediaan sumber daya alam merupakan salah satu faktor penentu dalam penciptaan nilai tambah. Oleh karenanya, kabupaten/kota yang memilikinya mampu menghasilkan PDRB yang relatif besar. Selain faktor produksi tersebut, ketersediaan prasarana juga turut mempengaruhi pembentukan nilai tambah.



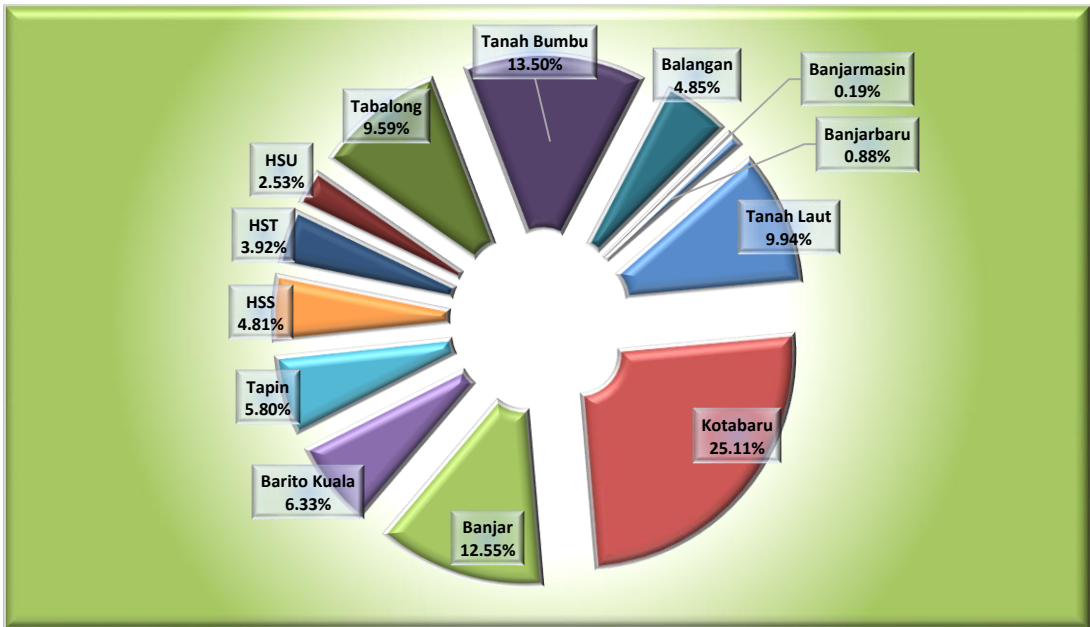
Gambar2.5
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 (dalam triliun rupiah)
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan



Sumber: Badan Pusat Statistik

Nilai PDRB Kabupaten Balangan pada tahun 2014 berada di urutan ketujuh jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan. Nilai PDRB tertinggi dicapai oleh Kota Banjarmasin kemudian diikuti oleh Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan nilai PDRB terkecil ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Gambar2.6 Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan,2014

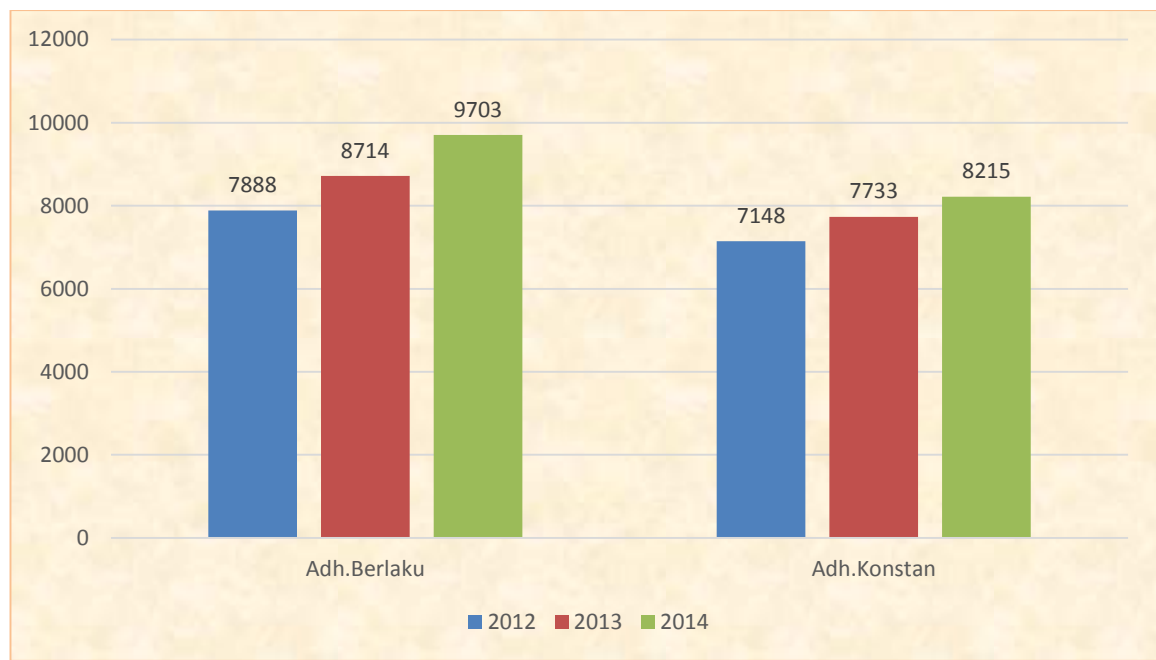


Sumber: Badan Pusat Statistik, Kalimantan Selatan Dalam Angka 2015



Dengan wilayah yang relatif luas, beberapa kabupaten seperti Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, Banjar, Tanah Laut, dan Tabalong mampu mencapai PDRB diatas 10 triliun rupiah. Selain itu, daerah-daerah tersebut juga memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah dibandingkan daerah lain. Sedangkan Kota Banjarmasin yang memiliki luas wilayah yang relatif kecil mampu menghasilkan PDRB yang cukup besar karena didukung oleh kekuatan sektor sekunder dan tersier, yakni dengan cukup banyaknya prasarana untuk kegiatan ekonomi seperti industri, konstruksi, perdagangan, transportasi, penyediaan akomodasi makan dan minum, komunikasi, keuangan, real estate, dan jasa-jasa.

Gambar 2.7 PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (dalam miliar rupiah),2014



Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB 2010-2014 (2010=100)

PDRB Kabupaten Balangan dalam kurun tahun 2012-2014 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2010=100 memperlihatkan kecenderungan terus meningkat. Pada Gambar 2.7 terlihat PDRB atas dasar harga berlaku Balangan mampu mencapai nilai 9.703 miliar rupiah pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 7.888miliar rupiah di 2012 dan 8.714miliar rupiah pada tahun 2013. Sementara atas dasar harga konstan, nominal PDRB juga menunjukkan peningkatan yakni pada tahun 2012 mencapai nilai 7.148miliar rupiah menjadi sebesar 8.215miliar rupiah di tahun 2014.



b. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu ukuran keberhasilan dalam pembangunan di bidang ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Perkembangan di sektor ekonomi yang terbentuk dari laju pertumbuhan ekonomi dapat memberikan gambaran tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pergerakan dari laju pertumbuhan merupakan indikator penting untuk mengetahui hasil pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah dan sasaran pembangunan selanjutnya.

Angka pertumbuhan ekonomi dapat pula memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi penduduknya. Hal ini mampu dijelaskan karena pada dasarnya pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (output).

PDRB atas dasar harga konstan secara berkala digunakan untuk melihat pergerakan pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya aktivitas perekonomian, sedangkan pertumbuhan yang negatif menunjukkan penurunan dalam kegiatan ekonomi. Laju pertumbuhan daerah dapat dicerminkan dari indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan pada tahun 2013 dan 2014, menunjukkan pertumbuhan yang positif. Secara umum pertumbuhan positif tersebut terjadi pada semua kategori lapangan usaha. Pada tabel 3.2 dapat dilihat pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2013 dan 2014 berkisar dari 2,73 sampai 9,10 persen.

Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi di kabupaten Balangan menunjukkan pertumbuhan yang positif dan melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013. Pertumbuhan cukup tinggi di tahun 2014 ada pada kategori lapangan usaha jasa lainnya dan kategori real estate.



Tabel 2.11 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan Tahun 2013^{*)}-2014^{**)} (dalam Persen)

Kategori Lapangan Usaha	2013 ^{*)}	2014 ^{**)}
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,97	3,96
2. Pertambangan dan Penggalian	9,34	6,64
3. Industri Pengolahan	5,20	4,74
4. Pengadaan Listrik, Gas	2,73	3,03
5. Pengadaan Air	3,73	6,48
6. Konstruksi	6,01	6,05
7. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Kendaraan	8,29	6,17
8. Transportasi dan Pergudangan	8,43	6,54
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,46	5,12
10. Informasi dan Komunikasi	6,64	6,12
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	9,10	3,92
12. Real Estate	5,50	7,06
13. Jasa Perusahaan	5,69	4,82
14. Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jam. Sosial Wajib	6,07	5,54
15. Jasa Pendidikan	7,24	6,21
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,46	5,74
17. Jasa lainnya		7,07
PDRB	8,19	6,23

Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB tahun 2010-2014

^{*)}Angka Sementara

^{**)}Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan berada pada posisi yang cukup tinggi diantara kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan baik pada tahun 2013, maupun pada tahun 2014. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.12 di bawah.



Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Dengan Migas Tahun 2013^{*)} - 2014^{**)}(dalam persen)

Kabupaten/Kota	2013 ^{*)}	2014 ^{**)}
(1)	(3)	(4)
1. Tanah laut	5,49	3,05
2. Kotabaru	5,20	4,34
3. Banjar	4,61	5,08
4. Barito Kuala	4,15	4,46
5. Tapin	5,74	5,48
6. Hulu Sungai Selatan	5,68	5,80
7. Hulu Sungai Tengah	5,91	5,58
8. Hulu Sungai Utara	5,29	6,00
9. Tabalong	4,36	3,98
10. Tanah Bumbu	3,81	3,63
11. Balangan	8,19	6,23
12. Banjarmasin	7,18	6,25
13. Banjarbaru	6,58	6,65
Kalimantan Selatan	5,36	4,85

Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB tahun 2010-2014

^{*)}Angka Sementara

^{**)}Angka Sangat Sementara

c. Struktur Ekonomi

Pada dasarnya struktur ekonomi di suatu wilayah tidak akan berubah signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Apalagi pada beberapa wilayah yang sudah mapan, perubahan struktur ekonomi hanya terjadi bila ada suatu perubahan yang drastis dari kegiatan ekonomi, seperti misalnya penanaman modal yang besar pada suatu kategori lapangan usaha tertentu atau perubahan dalam mengimplementasikan teknologi baru. Kategori lapangan usaha yang memiliki daya tahan yang tinggi tentunya akan mampu berkembang sehingga nantinya dapat meningkatkan peranan/kontribusi kategori lapangan usaha yang bersangkutan dalam struktur ekonomi di wilayahnya.

Secara umum, struktur ekonomi dalam PDRB Kabupaten Balangan dalam kurun waktu 2012-2014 menunjukkan komposisi kontribusi kategori lapangan usaha yang relatif stabil setiap tahunnya. Penurunan kontribusi kategori lapangan usaha di tahun 2014 terjadi pada kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan. Sementara kategori lapangan usaha lainnya ada yang tetap kontribusinya dan adapula yang



meningkat. Peranan/kontribusi untuk masing-masing kategori lapangan usaha, secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13 Struktur Ekonomi Kabupaten Balangan Tahun 2010 -2014^{**}) (dalam Persen)

Kategori Lapangan Usaha	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{**})
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,83	10,55	10,59
Pertambangan dan Penggalian	69,82	70,05	68,98
Industri Pengolahan	1,50	1,47	1,54
Pengadaan Listrik, Gas	0,02	0,01	0,01
Pengadaan Air	0,18	0,18	0,19
Konstruksi	3,33	3,25	3,50
Perdag. Besar,Eceran, dan Reparasi Mobil, Sepeda Motor	3,94	3,98	4,20
Transportasi dan Pergudangan	1,39	1,43	1,50
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,23	0,24	0,24
Informasi dan Komunikasi	1,13	1,07	1,08
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,23	0,23	0,23
Real Estate	0,73	0,74	0,76
Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05
Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,32	3,50	3,79
Jasa Pendidikan	2,30	2,26	2,32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,62	0,61	0,63
Jasa lainnya	0,38	0,37	0,39
PDRB	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB tahun 2010-2014

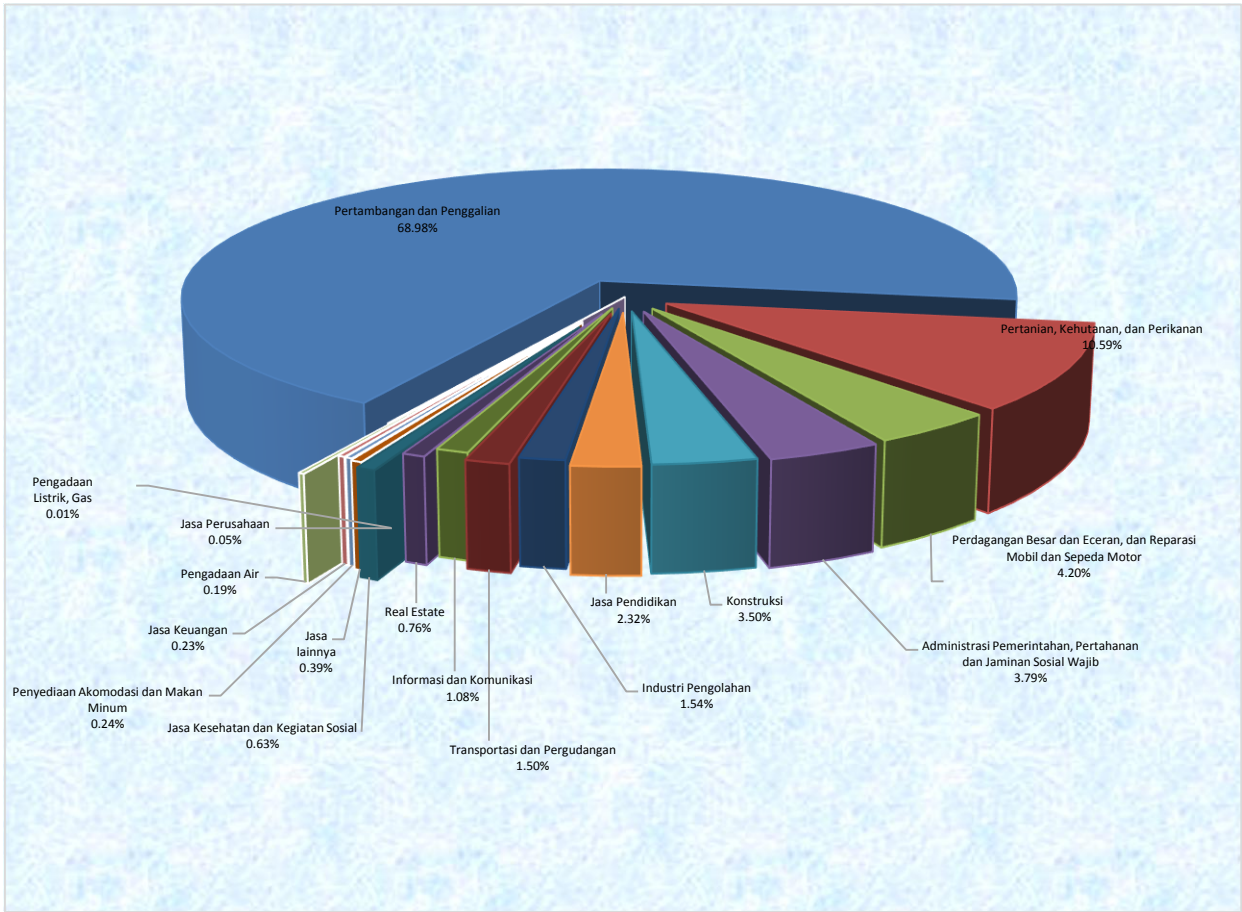
^{*)}Angka Sementara

^{**})Angka Sangat Sementara

Pada tabel 2.13 terlihat bahwa peranan terbesar dalam PDRB Balangan tahun 2014 berada pada kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Dalam kategori ini, mengingat Kabupaten Balangan sebagai salah satu kabupaten penghasil batubara, maka subkategori pertambangan batubara memiliki pengaruh yang relatif besar. Sementara kategori lapangan usaha lainnya selain pertambangan dan penggalian, hanya mampu mencapai akumulasi total sekitar 31,02 persen, dimana peranan terbesarnya berasal dari kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.



Gambar2.8 Distribusi PDRB Kabupaten Balangan Tahun 2014



Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB 2010-2014

Pada tahun 2014, kategori lapangan usaha yang memiliki peranan yang tinggi dalam struktur ekonomi Balangan adalah kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian (68,98 persen), kategori pertanian, kehutanan dan perikanan (10,59 persen), kategori perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor (4,20 persen), kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (3,79 persen), dan kategori konstruksi (3,50 persen). Dari kelima kategori ini, hanya kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan dalam kontribusinya di sektor perekonomian yakni dari sebesar 69,82 pada tahun 2012, menjadi 68,98 persen pada tahun 2014.

Setelah melihat gambaran struktur perekonomian dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan selama kurun waktu 2012-2014, maka pemerintah Kabupaten Balangan perlu membuat prioritas kebijakan berkaitan dengan hal tersebut. Penentuan prioritas kebijakan diperlukan agar pembangunan daerah dapat lebih terarah serta mampu berjalan dengan efektif dan efisien, sesuai dengan anggaran yang telah disediakan dan keterbatasan sumber daya yang dapat digunakan. Untuk menentukan prioritas kebijakan pembangunan khususnya di bidang ekonomi, diperlukan analisis ekonomi (struktur ekonomi) daerah secara menyeluruh. Dalam hal ini analisis yang dapat digunakan adalah analisis Tipologi Klassen. Teknik analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan kategori lapangan usaha di daerah. Selain itu,



teknik ini juga dapat digunakan untuk mengelompokkan daerah kabupaten/kota dalam provinsi menurut struktur pertumbuhannya.

Tipologi Klassen dengan pendekatan kategori lapangan usaha berdasarkan pengelompokkan suatu kategori dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah (ri) dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi acuan (r) dan membandingkan kontribusi kategori lapangan usaha suatu daerah (ki) dengan nilai rata-ratanya di tingkat yang lebih tinggi (k). Dimana kategori pengelompokkannya adalah jika $(ri) \geq (r)$ dan $(ki) \geq (k)$ maka sektor digolongkan sektor maju dan tumbuh pesat, jika $(ri) \geq (r)$ dan $(ki) < (k)$ maka sektor digolongkan sektor berkembang, jika $(ri) < (r)$ dan $(ki) \geq (k)$ maka sektor digolongkan sektor maju tapi tertekan dan jika $(ri) < (r)$ dan $(ki) < (k)$ maka sektor digolongkan sektor relatif tertinggal.

Tabel 2.14 Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan rata-rata Selama Tahun 2012 -2014^{) (dalam Persen)}**

Kategori Lapangan Usaha	Balangan		Kalimantan Selatan	
	PertumbuhanEkonomi	Kontribusi)	Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,37	10,66	3,27	14,53
Pertambangan dan Penggalian	7,99	69,62	3,47	28,56
Industri Pengolahan	4,97	1,51	3,63	13,06
Pengadaan Listrik, Gas	2,88	0,01	10,52	0,06
Pengadaan Air	5,10	0,18	5,91	0,36
Konstruksi	6,03	3,36	6,14	7,00
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,23	4,04	8,23	8,14
Transportasi dan Pergudangan	6,66	1,44	6,84	5,58
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,77	0,24	7,07	1,76
Informasi dan Komunikasi	4,79	1,10	8,38	3,07
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,28	0,23	10,68	3,16
Real Estate	8,08	0,75	6,38	2,07
Jasa Perusahaan	5,16	0,05	7,42	0,55
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,62	3,53	5,62	5,61
Jasa Pendidikan	6,14	2,29	8,11	3,88
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,49	0,62	7,76	1,59
Jasa lainnya	6,26	0,38	5,93	1,00
PDRB	7,21	100,00	5,10	100,00

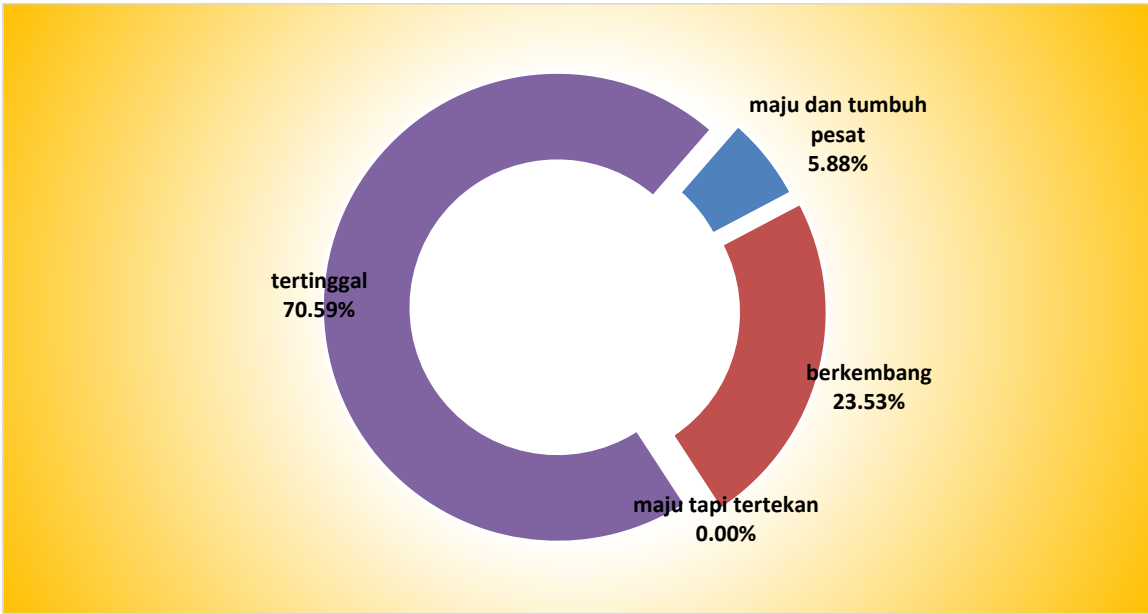
Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB 2010-2014 diolah

Berdasarkan hasil pengelompokkan kategori lapangan usaha Kabupaten Balangan bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, diketahui bahwa kategori-kategori lapangan usaha yang masuk dalam kelompok maju dan tumbuh pesat adalah kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Kemudian, untuk kelompok kategori berkembang terdiri dari kategori lapangan usaha industri pengolahan, kategori real estat,



kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan kategori Jasa lainnya. Sementara itu, tidak ada kategori lapangan usaha di Kabupaten Balangan yang masuk dalam kelompok kategori maju tapi tertekan. Terakhir adalah kelompok kategori tertinggal, yaitu kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, kategori pengadaan listrik dan gas, kategori pengadaan air, kategori konstruksi, kategori perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, kategori transportasi dan pergudangan, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, kategori informasi dan komunikasi, kategori jasa keuangan dan asuransi, kategori jasa perusahaan, kategori jasa pendidikan, dan kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Gambar 2.9 Pengelompokan Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Balangan Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2014



Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB 2010-2014, diolah

Dari hasil analisis di atas, dikaitkan dengan kegiatan perencanaan untuk pengembangan ekonomi Kabupaten Balangan di masa mendatang antara lain dapat dilakukan strategi pengembangan secara bertahap yang dibagi dalam beberapa periode dan skala prioritas dari ketujuh belas kategori lapangan usaha tersebut. Menurut periode waktunya, misalnya dapat dilakukan pengembangan dalam tiga tahap yakni prioritas pengembangan ekonomi untuk jangka pendek (1-5 tahun), jangka menengah (5-10 tahun), dan jangka panjang (10-25 tahun).

Untuk periode jangka pendek, pemerintah Kabupaten Balangan perlu mengambil langkah untuk meningkatkan kelompok kategori lapangan usaha yang sudah maju menjadi lebih maju lagi. Jangka menengah, pemerintah perlu mengupayakan kelompok kategori lapangan usaha berkembang menjadi sektor maju dengan memperbesar porsi outputnya pada perekonomian Kabupaten Balangan. Kemudian, menjadikan kelompok kategori lapangan usaha tertinggal menjadi kelompok kategori lapangan usaha berkembang. Dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh kelompok kategori



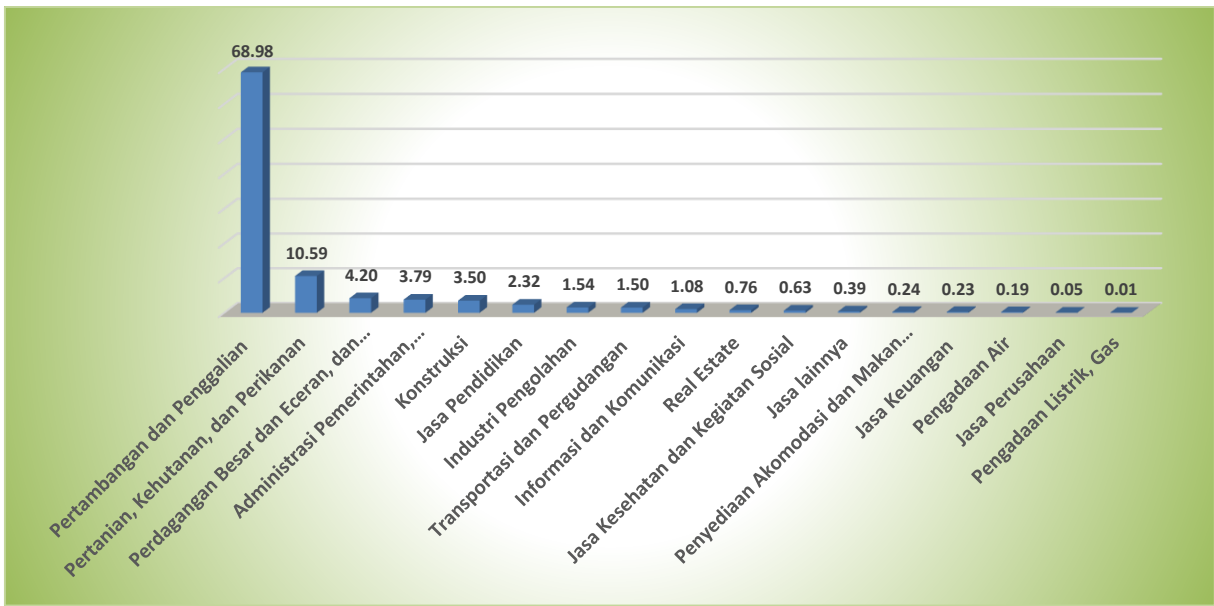
lapangan usaha tertinggal, sehingga ditemukan solusi yang tepat untuk kebijakan pengembangan kelompok kategori lapangan usaha tersebut.

Identifikasi potensi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan kategori lapangan usaha dalam perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa dengan segala aspeknya. Meskipun begitu, secara spesifik struktur perekonomian yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing kategori lapangan usaha tadi mempunyai korelasi dan ketergantungan yang komprehensif dalam berproduksi. Secara umum, struktur perekonomian menggambarkan besarnya kontribusi/peranan masing-masing kategori lapangan usaha dalam penciptaan PDRB suatu daerah. Disamping itu, struktur perekonomian juga dapat mencerminkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap suatu kategori lapangan usaha. Kategori lapangan usaha yang mempunyai peranan yang cukup besar akan menjadi andalan bagi daerah.

Selama periode tahun 2012-2014, dari ketujuh belas kategori lapangan usaha yang terangkum dalam PDRB, terdapat beberapa kategori lapangan usaha yang cukup dominan di Kabupaten Balangan. Lima diantaranya adalah kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian, kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, kategori lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan kategori lapangan usaha konstruksi. Untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian kepada kategori-kategori lapangan usaha yang menjadi andalan dan memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian daerah.

Gambar2.10

Peranan Kategori Lapangan Usaha dalam Perekonomian Kabupaten Balangan,2014



Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB 2010-2014, diolah



Gambar 2.11

Pertumbuhan Ekonomi Kategori Lapangan Usaha dalam Perekonomian Kabupaten Balangan,2014



Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB 2010-2014, diolah

Kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi yang terbesar diantara kategori-kategori lapangan usaha lainnya dalam perekonomian di Kabupaten Balangan. Selama kurun 2012-2014, kategori ini secara rata-rata berkontribusi sebesar 69,62 persen per tahun. Walaupun sangat dominan dalam perekonomian di Kabupaten Balangan, kategori lapangan usaha ini cenderung berkonsentrasi pada usaha yang berskala besar sehingga peningkatan ekonomi pada kategori ini kurang banyak dirasakan oleh masyarakat. Kategori ini dalam kurun waktu 2012-2013 mampu tumbuh secara rata-rata sebesar 7,99 persen per tahunnya.

Kontribusi terbesar kedua berasal dari kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Selama kurun waktu 2012-2014, kategori ini yang mampu menyumbang secara rata-rata sebesar 10,66 persen per tahunnya. Pertumbuhan kategori ini secara rata-rata mencapai 3,97 persen per tahun dalam kurun waktu 2012-2014.

Kontribusi terbesar ketiga berasal dari kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor. Selama kurun waktu 2012-2014, kategori ini yang mampu menyumbang secara rata-rata sebesar 4,04 persen per tahunnya. Pertumbuhan kategori ini secara rata-rata mencapai 7,23 persen per tahun dalam kurun waktu 2012-2014.



Kontribusi terbesar keempat berasal dari kategori lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Selama kurun waktu 2012-2014, kategori ini yang mampu menyumbang secara rata-rata sebesar 3,53 persen per tahunnya. Pertumbuhan kategori ini secara rata-rata mencapai 5,62 persen per tahun dalam kurun waktu 2012-2014.

Kontribusi terbesar kelima dalam PDRB Kabupaten Balangan berasal dari kategori lapangan usaha konstruksi. Selama kurun waktu 2012-2014, kategori ini yang mampu menyumbang secara rata-rata sebesar 3,36 persen per tahunnya. Pertumbuhan kategori ini secara rata-rata mencapai 6,03 persen per tahun dalam kurun waktu 2012-2014.

Selama periode tahun 2012-2014, kategori lapangan usaha yang menjadi andalan di Kabupaten Balangan mulai mengalami pergeseran secara perlahan dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di daerah manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Tabel 2.15. Data Kemiskinan Kabupaten Balangan Tahun 2010-2015

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	2010	112.430	8.702	7,74
2	2011	114.009	8.334	7,31
3	2012	117.248	8.003	6,86
4	2013	119.171	7.383	6,17
5	2014	122.044	7.660	6.29
6	2015	123.495		

Sumber Data : BPS Kabupaten Balangan Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 2.13 di atas, maka dapat diketahui bahwa sejak tahun 2008 sampai tahun 2013, persentase angka kemiskinan menurun cukup signifikan. Namun pada 2014 terjadi kenaikan persentase angka kemiskinan yaitu dari 6,17% ditahun 2013 menjadi 6,29%. Meningkatnya jumlah penduduk miskin relatif disebabkan oleh pertumbuhan penduduk Balangan yang cukup tinggi dan ditambah dengan migrasi penduduk dari luar Kabupaten Balangan yang tinggi, serta adanya inflasi dan menurunnya harga jual batubara dan karet yang menjadi tumpuan penghasilan masyarakat Kabupaten Balangan.



Beberapa program pengentasan kemiskinan seperti Bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS),Program Jaminan Sosial Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Sosial Daerah (Jamkesda), Pamsimas, PNPM Mandiri Perdesaan, Bantuan Sosial kegiatan Pengelolaan untuk Lahan dan Air, Bantuan Alat dan mesin serta sarana produksi pertanian/perkebunan dan lain-lain yang dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Balangan perlu lebih dipertajam dan dikoordinasikan agar lebih tepat sasaran.

b.Angkatan Kerja dan Produktivitas

**Tabel 2.16. Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015**

Tingkat Pendidikan	2013	2014	2015
Maksimum SD	37.262	37.865	36.226
SMTp	13.630	12.943	7.840
SMTA Umum	8.184	9.341	10.728
SMTA Kejuruan	1.447	2.245	3.893
Diploma	901	1.109	1.090
Universitas	2.583	2.607	5.216
Jumlah	64.007	66.110	64.993

Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2013-2015 (Agustus)

Ditinjau dari sektor ketenagakerjaan,tiga perempat penduduk bekerja di Balangan memiliki lapangan pekerjaan utama di sektor primer. Sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian dan pertambangan ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 75,35 persen. Sementara sektor tersier dan skunder menyerap tenaga kerja masing-masing 20,71 dan 3,95 persen.

**Tabel 2.17 Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015**

Lapangan Usaha	2013	2014	2015
Pertanian	45.953	46.801	33.129
Pertambangan	963	1.143	2.452
Industri	1.499	655	1.895
Listrik, Gas & Air		236	279
Bangunan	958	1.360	2.053
Perdagangan	5.905	8.532	10.498
Angkutan	781	658	1.194
Keuangan	390	254	861
Jasa	5.818	5.588	9.831
Jumlah	62.267	65.227	62.192

Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2013-2015 (Agustus)



**Tabel 2.18 Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja
Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015**

Jam Kerja	2013	2014	2015
0	2.121	1.084	2.162
1-9	3.886	3.177	3.717
10-14	6.395	5.315	4.253
15-24	27.403	21.744	12.702
25-34	11.202	13.805	19.570
35-44	5.872	8.769	7.393
45-59	3.738	6.743	6.155
>60	1.650	4.590	6.240
Jumlah	62.267	65.227	62.192

Sumber : BPS, SakernasTahun2013-2015 (Agustus)

Dilihat dari optimalisasi jam kerja, sebagian besar pekerja (78,51 persen) memiliki jam kerja kurang dari 35 jam setiap minggunya dan sebagian besar pekerja dengan jam kerja dibawah 35 jam/minggu ini adalah pekerja perempuan. Sementara 18,08 persen memiliki jam kerja 35 jam atau lebih selama seminggu dan di dominasi oleh pekerja laki-laki

Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2015 adalah 4,31 persen, terjadi kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2014 yang berkisar 1,34 persen. Kenaikan TPT ini diduga disebabkan oleh kelesuan di sektor pertambangan yang ditandai dengan banyaknya pemutusan kerja (PHK) pada perusahaan tambang di Kabupaten Balangan, serta rendahnya harga jual hasil kebun seperti karet. Selain itu banyaknya lulusan perguruan tinggi yang baru menyelesaikan pendidikannya yang belum mendapatkan peluang kerja yang sesuai.

Dibandingkan dengan wilayah lain di Kalimantan Selatan, angka pengangguran Balangan termasuk yang paling kecil. Kecilnya TPT tersebut tidak terlepas dari karakteristik Balangan sebagai wilayah agraris yang sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor pertanian. Selain itu juga terkait dengan mayoritas pekerja yang berstatus sebagai pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar yang memiliki tingkat keluwesan relatif lebih dibandingkan pekerja formal.

Rendahnyatingkat pengangguran juga tidak terlepas dari karakteristik Balangan sebagai wilayah agraris yang sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor pertanian. Selain itu juga terkait dengan mayoritas pekerja yang berstatus sebagai pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar yang memiliki tingkat keluwesan relatif lebih dibandingkan pekerja formal.



**Tabel 2.19 Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015**

Tingkat Pendidikan	2013	2014	2015
Maksimum SD	2,32	0,33	1,42
SMTP	4,67	1,82	5,43
SMTA Umum	2,93	2,79	10,22
SMTA Kejuruan			8,73
Diploma		23,53	18,81
Universitas			4,18
Total	2,72	1,34	4,31

Sumber : BPS, (Agustus) data diolah

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Balangan tahun 2015 adalah 4,31 persen ditinjau dari angkatan kerja, persentase terbanyak penganggur terbuka adalah penduduk dengan pendidikan tertinggi SMTA baik Umum maupun Kejuruan yaitu berkisar 18,95 persen dan Diploma yaitu berkisar 18,81 persen. Sementara yang berpendidikan SD ke bawah sekitar 1,42 persen dan sebanyak 4,18 persen adalah berpendidikan Universitas (S1), serta pendidikan SMPT sebanyak 5,43 persen. Kemudian jika ditinjau dari jenis kelamin, tingkat pengangguran masih didominasi oleh laki-laki yaitu sekitar 5,05 persen sedang perempuan Cuma 3,28 persen.

**Tabel 2.20 Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015 (%)**

JenisKelamin	2013	2014	2015
Laki-Laki	3,47	0,99	5,05
Perempuan	1,74	1,77	3,28
Jumlah	2,72	1,34	4,31

Sumber : BPS, data diolah

c. Agama

Agama dan sosial budaya menjadi landasan spiritual, moral dan etika dalam mendukung pelaksanaan pembangunan fisik/material. Setiap individu, keluarga dan masyarakat bebas mengekspresikan kehidupan beragamanya ataupun kepercayaannya. Sebagai makhluk sosial warga masyarakat bebas untuk berserikat atau berkumpul. Hal ini sudah dijamin oleh undang-undang.

Masyarakat di Kabupaten Balangan merupakan masyarakat yang mayoritas beragama islam. Tercatat sebanyak 114.027 orang beragama Islam. Sedangkan tempat peribadatan berdasarkan data yang tercatat di Kementerian Agama, jumlah sarana peribadatan tahun 2013 terdiri dari 128 mesjid, 360 langgar/musholla, 10 gereja, 1 pura, 5 wihara dan 17 balai adat.



2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.3.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan, untuk itu Pemerintah Kabupaten Balangan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Pengembangan sarana pendidikan dilakukan sesuai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan oleh penduduk seoptimal mungkin dan pemerataan penyebaran jumlah penduduk yang akan dilayani dan perkiraan tingkat kebutuhan yang telah ditetapkan. Sarana pendidikan yang ada di Wilayah Kabupaten Balangan meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum.

a. Perkembangan Sarana Pendidikan

Jumlah dan kualitas serta sebaran sekolah di Kabupaten Balangan sangat menentukan kualitas dari proses belajar mengajar, karena hal tersebut berpengaruh terhadap komposisi siswa di tiap sekolah.

Tabel 2.21
Perkembangan Sarana Pendidikan di Kabupaten Balangan
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2015
Tahun (buah)

Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TK	76	76	76	106	113	121
SD	159	159	167	169	172	174
SLTP	23	23	23	23	23	24
SMU	9	9	9	10	14	14

Sumber : Dinas Pendidikan & Kementerian Agama Kabupaten Balangan, IPM Tahun 2015

Jika dilihat pada Tabel 2.21. perkembangan sarana dan prasarana pendidikan secara kuantitas meningkat dalam kurun waktu tahun 2010-2015. Untuk Taman Kanak-kanak dari 76 buah pada tahun 2010 meningkat menjadi 121 buah pada tahun 2015, Sekolah Dasar 159 buah pada tahun 2010 menjadi 174 buah tahun 2015. Untuk sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) pada tahun 2010 berjumlah 23 buah meningkat menjadi 24 buah pada tahun 2015, dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dari 9 buah pada tahun 2010 meningkat menjadi 14 buah pada tahun 2015.



Tabel 2.22.
Perkembangan Jumlah Murid di Kabupaten Balangan
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2015

Jenjang	Tahun (buah)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TK	2.683	2.683	2.683	3.863	4.560	4.736
SD	15.968	16.373	16.261	15.577	12.891	12.447
SLTP	2.723	5.322	5.321	4.893	2.960	3.029
SMU	2.209	3.336	3.683	3.676	2.855	3.103

Sumber : Dinas Pendidikan & Kementerian Agama Kabupaten Balangan, IPM Tahun 2015

Tabel 2.23
Rasio Murid-Sekolah, Rasio Murid-Kelas, dan Rasio Murid-Guru
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015

Tingkat Pendidikan	Rasio Murid Sekolah	Rasio Murid-Kelas	Rasio Murid-Guru
Taman Kanan-Kanan (TK)	39	19	15
SD / Sederajat	67	12	8
SLTP / Sederajat	137	26	9
SMU / Sederajat	202	26	9

Sumber : Dinas Pendidikan & Kemeag Kab. Balangan, IPM Tahun 2015

Berdasarkan tabel 2.17 dan 2.18 di atas menunjukkan bahwa pada peningkatan jumlah murid terjadi hanya pada tingkatan TK yaitu dari 2.683 murid tahun 2012 menjadi 3.863 pada tahun 2013, yang berarti ada peningkatan jumlah murid sebesar 1.180 orang. Peningkatan jumlah murid yang cukup banyak ini jika dilihat berdasarkan data sementara juga diikuti oleh penambahan jumlah TK dan ruang kelas.

Jika dilihat berdasarkan rasionya, untuk rasio murid-sekolah menunjukkan kemampuan sekolah menampung murid, terbanyak adalah SMU/Sederajat yaitu 1:229,8 artinya 1 sekolah terdapat ± 230 murid sedangkan rasio yang paling sedikit adalah di Taman Kanak-Kananyaitu 1:37,5 (1 sekolah menampung ± 36 murid).

Sedangkan untuk rasio murid-kelas menunjukkan bahwa SMU/Sederajat mempunyai rasio yang tertinggi yaitu 1:26,07 yang berarti satu kelas dapat menampung ± 26 orang murid. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat mutu pengajaran di kelas karena semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin kurang tingkat pengawasan atau perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Sedangkan rasio murid-guru menunjukkan beban kerja guru dalam mengajar, terbanyak adalah di tingkat TK yaitu 1:11,85 (1 guru mengajar ± 12 murid).



b. Indeks Pendidikan

1) Angka Melek Huruf

Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari angka melek huruf yang didefinisikan sebagai persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya. Kemampuan ini dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu, agar paling tidak memiliki peluang untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Pada tahun 2013, secara rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Balangan yang dapat membaca dan menulis sebesar 96,73 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sekitar 69 persen penduduk Balangan yang berusia 15 tahun keatas, maka dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Balangan sudah dapat menikmati pendidikan dengan baik, hanya 3,27 persen penduduk yang diindikasikan buta huruf.

Angka melek huruf Balangan jika dibandingkan dengan Kalimantan Selatan tergolong cukup baik walaupun masih lebih rendah. Pada tahun 2013, pencapaian angka melek huruf provinsi Kalimantan Selatan adalah 97,18 persen. Angka melek huruf terendah adalah kabupaten Barito Kuala dengan 94,19 persen. Peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) yaitu pada angka 95,66 persen di tahun 2012 menjadi 96,73 persen pada tahun 2013 yang sangat signifikan berpengaruh terhadap angka IPM kab. Balangan.

2) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah, yaitu rata-rata yang telah dihabiskan oleh penduduk suatu daerah di seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalaninya. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah diduduki dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Balangan tahun 2013 masih berkisar sebesar 7,05 tahun. Dengan kata lain rata-rata penduduk di Kabupaten Balangan baru mengenyam pendidikan hingga kelas 1 SMP atau belum sepenuhnya bisa menikmati program wajib belajar (WAJAR) 9 tahun.

Sama kondisinya dengan capaian angka harapan hidup dan angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Balangan masih lebih rendah dibandingkan angka rata-rata lama sekolah provinsi sebesar 8,01 tahun, bahkan angka rata-rata lama sekolah Balangan merupakan yang terendah se-Provinsi Kalimantan Selatan. Melihat kondisi ini, tampaknya sektor pendidikan di Kabupaten Balangan perlu mendapat perhatian lebih lanjut, terutama di era otonomi sekarang ini.



c. Capaian Pembangunan Bidang Pendidikan

Pendidikan diharapkan dapat mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas yang nantinya dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam membangun daerah. Pembangunan di bidang pendidikan merupakan upaya meningkatkan kualitas SDM, agar SDM dari daerah Balangan dapat menjadi manusia seutuhnya, sehat jasmani-rohani, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kualitas SDM yang demikian ini menjadi sasaran pembangunan di bidang pendidikan. SDM Kabupaten Balangan diharapkan dapat bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain di bursa kerja dan dalam kancah dunia usaha. Adapun Indikator capaian pembangunan bidang pendidikan kabupaten Balangan terdiri dari: angka partisipasi Kasar/APK, Angka partisipasi murni/APM, Nilai rerata UN, Angka mengulang, dan Angka putus sekolah, serta Angka kelulusan.

Angka Partisipasi Kasar/APK merupakan indikator untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang sedang/telah menerima pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 2013, APK SD mencapai 105,79. Angka ini menunjukkan persentase murid yang sedang sekolah di jenjang SD/ sederajat yang berumur 7-12 tahun bahkan lebih atau kurang. Jika dibandingkan berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa APK perempuan sedikit lebih rendah dibanding APK laki-laki kecuali pada tingkat SMA. dibandingkan berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa APK perempuan sedikit lebih rendah dibanding APK laki-laki kecuali pada tingkat SMA. dibandingkan berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa APK perempuan sedikit lebih rendah dibanding APK laki-laki kecuali pada tingkat SMA.. Semakin tinggi jenjang pendidikan terlihat bahwa APK cenderung menurun. Bahkan untuk tingkat SMP dan SMA nilai APK di bawah angka 100, hal ini mengindikasikan bahwanya sebagian dari anak berusia 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang tersebut dan kemungkinan sisanya sedang sekolah pada jenjang pendidikan di bawahnya/di atasnya atau bahkan putus sekolah. Oleh karena itu, untuk memperjelas lagi arti APK diperlukan indikator APM dan APS

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Menurut teori, besarnya APM akan selalu lebih kecil daripada APK. Nilai APM yang lebih kecil daripada nilai APK-nya dapat menunjukkan komposisi umur penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Untuk jenjang SD (7-12 tahun) terlihat bahwa APK mencapai 105,79 persen sementara APM 92,67 persen. Selisih 13,12 persen memiliki arti bahwa diantara murid SD/ sederajat sebanyak 13,12 persen berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. APM SMP pada 2013 mencapai angka 61,67 persen sedangkan APKnya mencapai 79,87 persen. Ini artinya hanya 61,67 persen penduduk usia 13-15 tahun yang terserap sebagai siswa SMP, sisanya bisa terserap pada jenjang pendidikan SD, SMU, atau bahkan tidak bersekolah lagi. Selisih 18 persen dapat diartikan sebagai



jumlah murid SMP yang berada diluar rentang usia 13-15 tahun. Begitu pula untuk jenjang SMU (16-18 tahun), terdapat selisih sebesar 21 persen siswa SMU yang berusia diatas 18 tahun atau dibawah 15 tahun. Hal ini dimungkinkan karena banyak anak yang bersekolah lebih dini dari anak lain, atau sebaliknya.

Tabel 2.24.
Indikator Capaian Pembangunan Bidang Pendidikan
Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015

No	Indikator	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
		SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA
1	Angka Partisipasi Kasar/APK (%)	116,99	90,78	78,33	112,80	90,78	81,58	115,55	97,60	82,66
2	Angka Partisipasi Murni/APM (%)	96,27	64,13	40,44	96,27	64,13	43,88	87,47	60,60	47,71
3	Nilai rerata UN	6,45	6,24	7,07	6,06	6,50	6,28	6,26	6,45	6,24
4	Angka mengulang (%)	6,48	0,24	0,52	6,48	0,24	0,24	0,24	0,28	0,25
5	Angka putus sekolah (%)	0,43	0,64	0,33	0,43	0,64	0,64	0,09	0,85	0,25
6	Angka kelulusan (%)	98,93	92,63	91,81	100	99,88	98,06	100	98,99	96,76

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Balangan Tahun 2016, BDA tahun 2016

Berdasarkan Tabel 2.24 terlihat angka angka putus sekolah pada SLTA mengalami peningkatan yaitu dari 0,33 persen pada tahun 2013 menjadi 0,57 persen di tahun 2014. Namun pada tingkatan SD angka putus sekolah justru mengalami penurunan yang signifikan dari 0,43 pada tahun 2013 menjadi 0,10 pada tahun 2014. Di sisi lain untuk APK, APM, dan rata-rata nilai UN secara umum mengalami peningkatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari data yang ada seharusnya dikaji lebih mendalam sehingga kondisi data lebih stabil dan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

2.3.2. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Balangan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan kesehatan juga memuat mutu dan upaya kesehatan dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Pembangunan tersebut diarahkan kepada peningkatan fasilitas kesehatan dan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumber daya yang memadai, seperti rumah sakit,



puskesmas, tenaga kesehatan dan ketersediaan obat. Jika dilihat pada Tabel 2.25. menunjukkan bahwa jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2012.

**Tabel 2.25. Perkembangan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Balangan
Tahun 2010-2015 (Orang)**

Tenaga Kesehatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dokter	30	30	32	31	36	30
Perawat	161	129	245	238	227	246
Bidan	117	128	215	200	199	215
Jumlah	308	287	492	469	462	491

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, BDA Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 2.25, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 terdapat 30 orang dokter. Dengan jumlah penduduk Balangan sebanyak 119.171 jiwa, maka berarti terdapat sekitar 1 dokter untuk melayani setiap 3.310 penduduk. Angka ini masih relatif tinggi, sehingga hal ini harus menjadi salah satu prioritas untuk peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Selain tenaga dokter, terdapat pula tenaga kesehatan lainnya seperti bidan dan perawat. Jumlah perawat mengalami penurunan dari tahun 2013 sebanyak 238 orang menjadi 227 orang perawat pada tahun 2014. Secara rata-rata dari jumlah tenaga kesehatan tersebut dapat melayani 524 jiwa per satu orang tenaga kesehatan pada tahun 2014.

Berdasarkan penolong kelahiran pertama dan penolong terakhir bayi, pada tahun 2013 secara umum mengalami peningkatan pada penggunaan jasa tenaga medis dibandingkan tahun 2012. Hal ini ternyata tidak berkorelasi nyata dengan menurunnya jumlah tenaga kesehatan di tahun 2014. Jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.26 berikut ini.

**Tabel 2.26.
Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama
dan Terakhir Tahun 2014 dan 2015**

Penolong Kelahiran	Kelahiran 2014		Kelahiran 2015	
	Pertama	Pertama	Pertama	Terakhir
Tenaga Medis	87,63	87,63	95,9	95,9
Dukun Bersalin	12,37	12,37	4,09	4,09
Famili/Keluarga	-	-	-	-
Total	100,00	100,00	100	100

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Balangan Tahun 2016



Tabel 2.27.
Perkembangan Sarana Kesehatandi Kabupaten Balangan Tahun 2009-2015 (buah)

Fasilitas Kesehatan	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rumah Sakit	1	1	1	1	1	1	1
Puskesmas	10	11	11	11	11	11	12
Pustu	27	26	22	23	24	24	23
Poskesdes	15	93	93	94	99	105	107
Polindes	49	-	-	-	-	-	-
Jumlah	102	131	136	137	138	141	143

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, BDA Tahun 2016

Untuk fasilitas kesehatan pada saat ini di setiap kecamatan telah tersedia Puskesmas, Pustu dan Polindes. Pada Tahun 2008 telah berdiri Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balangan yang telah didukung dengan sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif kepada masyarakat Balangan khususnya dan masyarakat luar Kabupaten Balangan pada umumnya. Jumlah fasilitas pada tahun 2015terjadi peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2014, peningkatan yang cukup menonjol adalah pada Poskesdes dari 99 buah menjadi 105 buah.

Penambahan fasilitas kesehatan dan tenaga medis ini perlu dioptimalkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perkembangan derajat kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28. Perkembangan Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Jenis Data Demografi	Tahun						Ket.
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Jumlah Kematian Bayi	49	32	20	41	46	36	orang
2	Jumlah Kematian Ibu	6	2	5	2	7	6	orang
3	Rata-rata Angka Harapan Hidup	-	62,02	62,32	62,50	66,65		tahun

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Balangan, BDA tahun 2016

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kematian bayi pada tahun 2014 berjumlah 46 orang meningkat jika dibandingkan tahun 2013 yang berjumlah 41 orang.Jumlah kematian ibu meningkat pada tahun 2014dibandingkan tahun 2013. Sedangkan angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Balangan tahun 2013sebesar 62,50 dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 sebesar 62,32 tahun.

Secara perlahan terjadi peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa angka ini masih sangat jauh dari angka ideal harapan hidup waktu lahir seseorang di mana nilai tertinggi adalah 85 tahun. Angka inijuga masih lebih rendah dibandingkan angka harapan hidup provinsi Kalimantan Selatan, yaitu sebesar 66,37 tahun.



Jika dilihat keterbandingan antar kabupaten/kota, maka Kabupaten Balangan menempati urutan terendah dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Berdasarkan AHH tersebut dapat dihitung indeks kesehatan Balangan, dimana berdasarkan data BPS Kabupaten Balangan, pada tahun 2013, indeks kesehatan Kabupaten Balangan berkisar pada angka 62,50 persen. Jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.24 berikut.

Tabel. 2.29
Perkembangan Indeks Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2010-2014

No	Tahun	Balangan	Kalimantan Selatan
1	2010	71,31	71,77
2	2011	71,46	72,12
3	2012	71,61	72,48
4	2013	71,72	72,85
5	2014	71,77	73,03

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, indeks kesehatan Kabupaten Balangan termasuk dalam kategori sedang yang tidak terpaut terlalu jauh dari indeks kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

2.3.3. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pelaksanaan pembangunan pada program ini selain melalui peningkatan jumlah prasarana juga dengan memperluas jumlah akseptor terhadap program KB telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tercapainya masyarakat yang sejahtera melalui perencanaan dan pengendalian jumlah kelahiran adalah tujuan dari pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Jumlah akseptor KB Baru di Kabupaten Balangan relatif merata di setiap kecamatan, terbanyak terdapat pada kecamatan Lampihong yaitu sebanyak 1.234 orang, kemudian Kecamatan Juai sebanyak 682 orang, sedangkan paling sedikit di Kecamatan Awayan yang hanya 288 orang.



Tabel. 2.30. Banyaknya Akseptor KB Baru Menurut Pemakaian Jenis Alat Kontrasepsi Per Kecamatan Tahun 2015

DAERAH	Jenis Alat Kontrasepsi							Jumlah
	IUD	Pil	Kondom	Suntikan	Implant	MOP	MOW	
Lampihong	-	697	-	78	16	-	2	238
Batumandi	-	180	-	80	22	-	1	283
Awayan	4	159	-	46	12	-	-	221
Tebing Tinggi	-	71	-	29	25	175	43	343
Paringin	10	283	7	128	13	-	-	441
Paringin selatan	4	108	-	48	23	3	6	192
Juai	-	154	1	55	17	-	-	227
Halong	1	205	-	85	28	-	5	324
JUMLAH	19	1.302	8	549	156	178	57	2.269

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2015

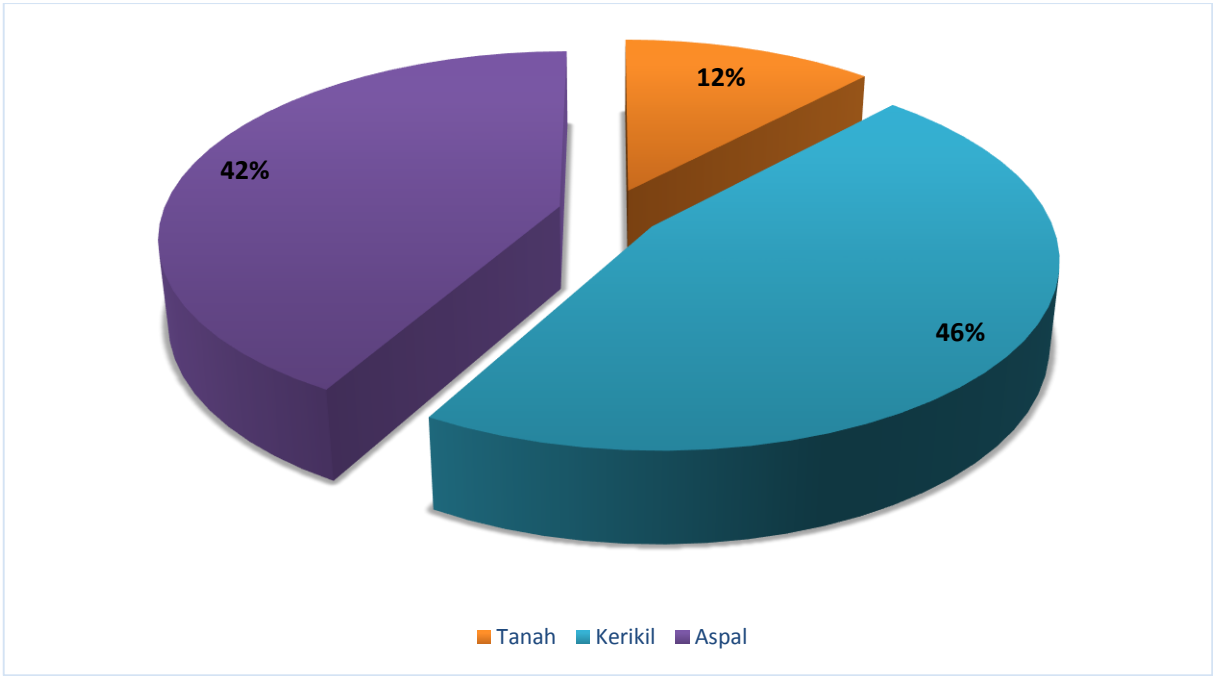
2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Perhubungan

Aktivitas masyarakat sehari-hari memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya adalah jalan sebagai sarana mobilitas daerah masyarakat dan lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Sebagai salah satu kabupaten yang sedang giat melakukan pembangunan, Kabupaten Balangan terus membangun jalan dan jembatan baru dan meningkatkan kualitas jalan jembatan yang telah ada. Pada tahun 2013, total panjang jalan di wilayah kabupaten Balangan yang merupakan wewenang kabupaten sepanjang 601,500 km. Dari panjang tersebut, sebesar 42,00 persen memiliki permukaan aspal, sedangkan 43,41 persen masih merupakan permukaan kerikil. Sedangkan sisanya yakni sebesar 14,59 persen adalah permukaan tanah. Secara umum kondisi jalan di Balangan adalah rusak ringan yaitu sebesar 55,95 persen. Hanya sekitar 20,82 persen dari total panjang jalan yang ber kondisi baik (BPS, 2014).

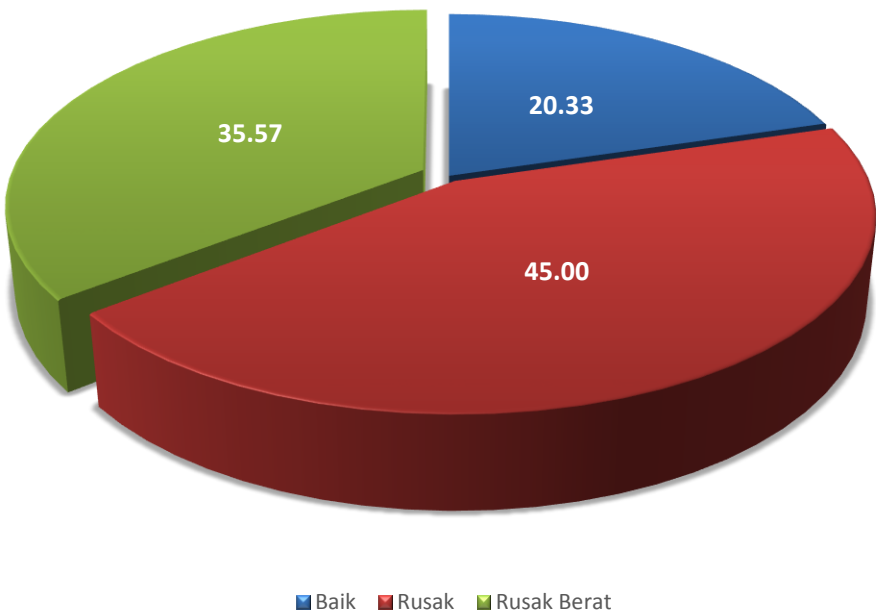


Gambar 2.12
Persentase Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2015



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan Tahun 2016

Gambar 2.13
Persentase Jalan Menurut Kondisi Jalan Tahun 2015



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan Tahun 2016

Sebagai daerah pegunungan yang topografinya bergelombang disertai banyaknya Daerah Aliran Sungai, menyebabkan diperlukannya banyak jembatan sebagai sarana penghubung transportasi



darat. Diantaranya telah dibangun jembatan baru di jalan lingkaran timur yang menghubungkan Muara Pitap Kecamatan Paringin Selatan dengan Gunung Pandau Kecamatan Paringin.

Tabel 2.31.
Jumlah Jembatan berdasarkan Jenis dan Kondisi
di Kabupaten Balangan Tahun 2013 - 2014 (dalam buah)

Jenis	Tahun 2014				Tahun 2015			
	Jumlah	Kondisi			Jumlah	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak berat		Baik	Rusak Ringan	Rusak berat
Beton	15	13	2	-	16	15	1	-
Baja	28	23	4	1	28	21	5	2
Box Culvert	82	64	15	3	191	138	53	-
Kayun Ulin	347	75	195	77	286	72	72	142
Kayu	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	472	175	216	81	521	246	131	144

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan Tahun 2015

Untuk memperlancar arus distribusi barang, dan meningkatkan perekonomian Kabupaten Balangan, selain meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan, telah dibangun juga sarana angkutan, yaitu terminal. Terminal yang ada di kabupaten Balangan adalah Terminal Paringin. Terminal ini merupakan Terminal Angkutan Pedesaan dan Terminal Antar Kota Dalam Propinsi sesuai status yang diberikan. Mulai tahun 2016 ini, Terminal ini secara bertahap akan dialihfungsikan dan direncanakan untuk membangun terminal baru. Hal ini dikarenakan terminal yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan Kota Paringin. Tahun 2017 nanti akan disusun Perencanaan untuk rencana pembangunan terminal baru Balangan.

2.4.2 Pos dan Telekomunikasi

Dalam memberikan Pelayanan kepada masyarakat berupa kegiatan pengiriman dan penerimaan benda-benda pos, seperti surat menyurat, paket pos, wesel, giro, dan tabungan, telah didukung dengan keberadaan 1 buah Kantor Pos Kabupaten, 4 buah Kantor Pos Pembantu dan 3 buah rumah Pos. Kantor Pos berlokasi di Kecamatan Paringin sedangkan kantor pos pembantu tersedia di Kecamatan Lampihong, Juai, Batu Mandi dan Awayan sedangkan rumah pos berlokasi di Kecamatan Halong, Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi. Pada saat ini selain kantor pos, juga sudah tersedia fasilitas sambungan telepon (*fixed telephone*) dari Telkom beserta layanan jaringan dari PT. Telkomsel, Indosat, dan Exelindo.



Tabel 2.32.
Fasilitas Pelayanan Pos Dirinci Menurut Kecamatan

Kecamatan	Kantor Pos	Rumah Pos
Lampihong	1	-
Paringin	1	-
Juai	1	-
Halong	-	1
Batu Mandi	1	-
Paringin Selatan	-	1
Awayan	1	-
Tebing Tinggi	-	1
Jumlah	5	3

Sumber : Balangan dalam Angka 2015

2.4.3. Air Minum

Dalam pemenuhan kebutuhan Air penduduk Kabupaten Balangan tercukupi dari air sumur, sungai dan PDAM. Air sungai merupakan sumber air yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di Kabupaten Balangan terdapat dua sungai utama, yaitu Sungai Balangan dan Sungai Pitap. Padahal sungai-sungai tersebut merupakan sungai tadah hujan sehingga debitnya sangat tergantung pada musim. Pada musim kemarau debit sungai kecil, sungai menjadi dangkal bahkan sampai terlihat dasar sungainya. Sebaliknya di musim hujan debit sungai itu menjadi besar, arusnya menjadi deras, dan air sungai menjadi sangat keruh akibat pengerosian dari tebing-tebing sungai. Tabel 2.30. dan 2.31. menunjukkan data air minum yang ada di Kabupaten Balangan.

Tabel 2.32.
Banyaknya Produksi Air, Distribusi, Terjual dan Hilang/Susut dalam Penyaluran

Kecamatan	IKK/IPA	Produksi (m³)	Distribusi (m³)	Terjual (m³)	Susut/Hilang (m³)
Lampihong	IKK	277.865	277.865	232.820	45.045
Batumandi	IKK	162.780	162.780	139.494	23.286
Awayan	IKK	106.671	106.671	91.698	14.973
Tebing Tinggi	-	-	-	-	-
Paringin	IPA	1.658.863	1.658.863	1.383.706	275.157
Paringin Selatan	IKK	33.636	33.636	30.090	3.546
Juai	IKK	285.762	285.762	254.047	31.715
Halong	IKK	127.190	127.190	105.758	21.432
Jumlah		2.652.767	2.652.767	2.237.613	415.154

Sumber : PDAM Kabupaten Balangan, BDA Tahun 2014



Tabel 2.33.
Kapasitas Produksi Terpasang PDAM Kabupaten Balangan
Tahun 2007-2014Tahun (Ltr/dtr)

No.	Unit PDAM	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
p1.	Paringin								
	a. Paringin I	10.0	10.0	10.0	10.0	10	10	10	10
	b. Paringin II	30.0	30.0	80.0	80.0	150	150	150	150
	c. Paringin III	15.0	15.0	15.0	15.0	45	45	45	45
2.	Halong	10.0	10.0	10.0	10.0	30	30	30	30
3.	Juai	5.0	5.0	5.0	5.0	60	60	60	60
4.	Lampihong	5.0	5.0	5.0	5.0	40	40	40	40
5.	Batu Mandi	10.0	10.0	10.0	10.0	15	15	15	15
6.	Awayan	12.5	12.5	12.5	12.5	30	30	30	30
7.	Paringin Selatan	-	-	-	-	20	40	40	40
8.	Tebing Tinggi	-	-	-	-	-	-	20	20
Jumlah		97.5	97.5	187.5	187.5	400	420	440	440

Sumber : PDAM Kabupaten Balangan Tahun 2014

2.1.15. Listrik

Kebutuhan listrik di Kabupaten Balangan setiap tahunnya meningkat, hingga pada Tahun 2013jumlah pelanggan listrik sudah mencapai23.453pelanggan (tidak termasuk Kecamatan Batu Mandi). Kebutuhan listrik di Kabupaten Balangan sebagian besar dipenuhi oleh PT. PLN Cabang Tanjung Wilayah Ranting Paringin. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.28. berikut ini.

Tabel 2.34.
Banyaknya Pelanggan Listrik, VA Terpasang dan KWH Terjual Menurut Jenis Tarif
Tahun 2014

NO	Jenis Tarif	Pelanggan	VA Terpasang	KWH Terjual
1	S (1,2,3)	795	818.750	1.133.984
2	R (1,2,3,4)	22174	13.971.850	23.885.822
3	B (1,2)	277	768.650	895.656
4	I (1,2,3,4)	9	373.500	1.197.413
5	P (1,2,3)	198	1.525.400	3.227.751
JUMLAH		23.453	17.458.150	30.340.626

Sumber: PT. PLN Ranting Paringin, BDA Tahun 2015

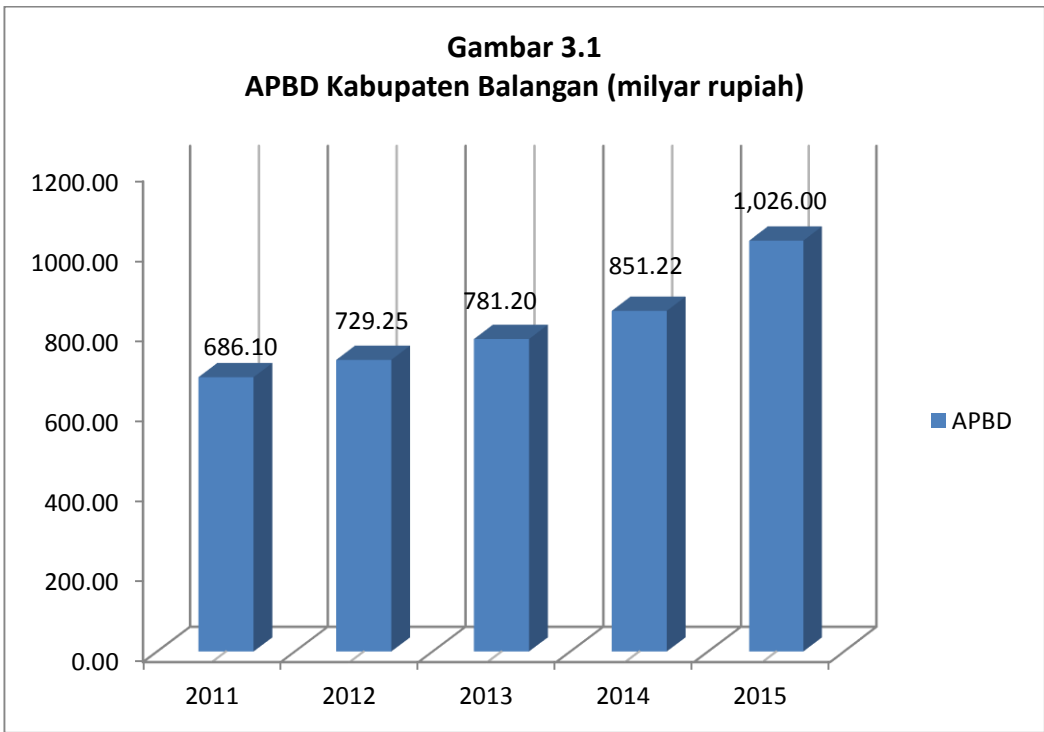


BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

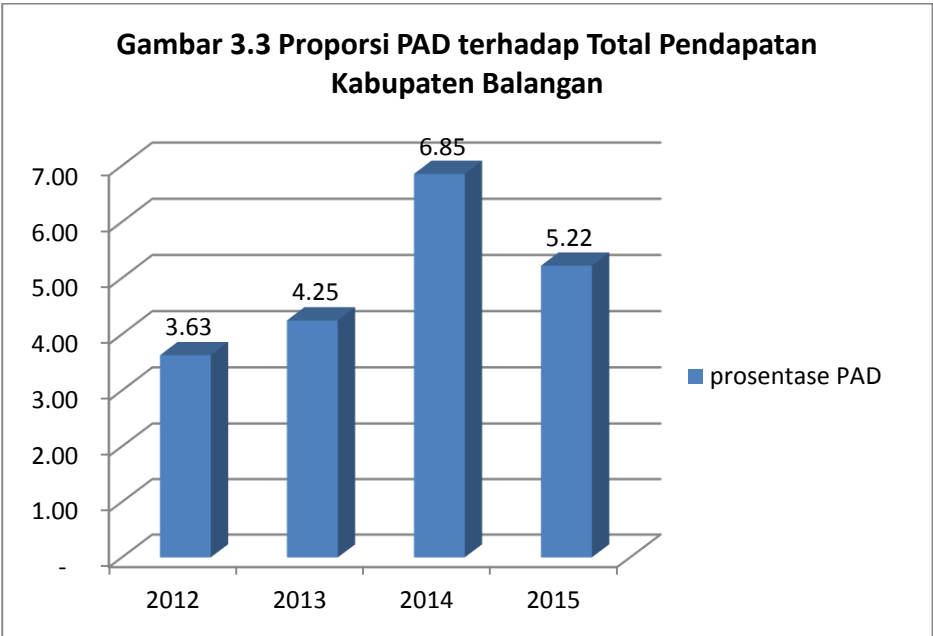
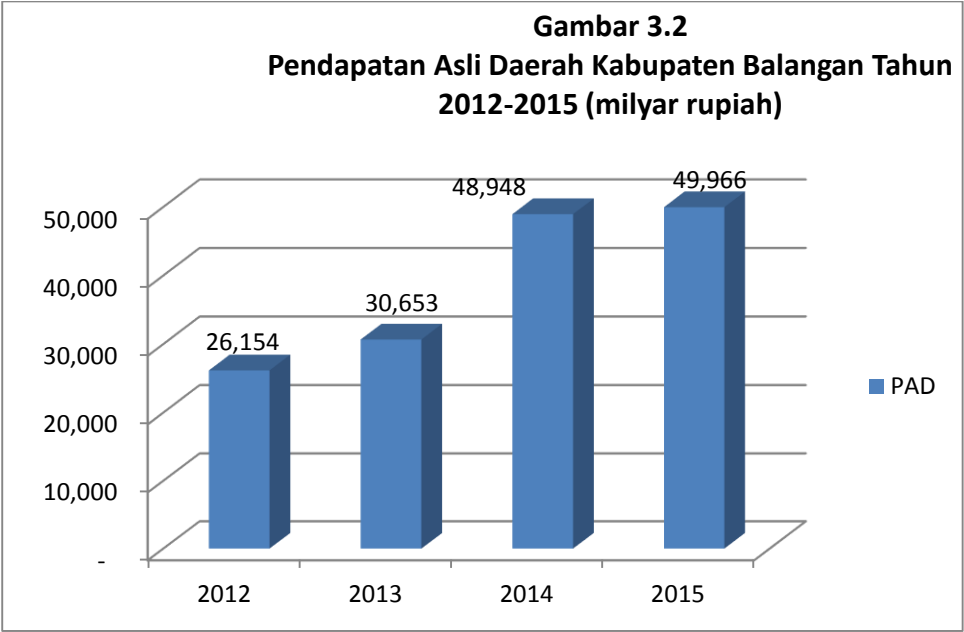
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan sejak Tahun 2011 hingga Tahun 2015 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Sejak tahun 2011 sampai tahun 2015, APBD Balangan mengalami peningkatan hampir 90 persen. Jelasnya kinerja APBD Kabupaten Balangan dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Data Primer yang diolah

Dari sisi volume terus meningkat, namun dari sisi pendapatan, terutama pendapatan asli daerah, maka hal ini menunjukkan indikasi bahwa APBD Kabupaten Balangan belum mencerminkan APBD yang memiliki kemandirian. Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan daerah hanya berkisar antara 3,5 sampai 6,0 persen. Jelasnya tentang PAD dapat dilihat pada gambar 3.2 dan 3.3.



3.1.2. Neraca Daerah

Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Pemahaman akan aset bisa berbeda antara ilmu perencanaan, manajemen keuangan, dan akuntansi. Aset daerah diperoleh dari dua sumber, yakni dari APBD dan dari luar APBD.

Aset yang bersumber dari pelaksanaan APBD merupakan *output/outcome* dari terealisasinya belanja modal dalam satu tahun anggaran. Dalam konsep anggaran kinerja, biaya yang dikeluarkan adalah semua biaya yang menjadi masukan (*input*) dalam



pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan aset ini. Dengan demikian, termasuk di dalamnya belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, selain dari belanja modal tentunya. Jadi, *cost* untuk aset adalah seluruh pengeluaran untuk mencapai *outcome*. Aset yang bersumber dari luar pelaksanaan APBD, dalam hal ini, perolehan aset tidak dikarenakan adanya realisasi anggaran daerah, baik anggaran belanja modal maupun belanja pegawai dan belanja barang & jasa; misalnya aset yang diterima dari pihak lain, seperti lembaga donor dan masyarakat.

Dalam pengelolaan isu yang terkait dengan aset mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan, harus terus menerus mendapatkan perhatian dan perbaikan sehingga pengelolaan aset di Kabupaten Balangan dapat dilaksanakan dengan baik. Rekapitulasi aset Kabupaten Balangan sampai dengan tahun anggaran 2015 disajikan dalam Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Rekapitulasi Aset Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2014-2015

No	Tahun Perolehan	Tanah (Rp)	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Aset Tetap lainnya (Rp)	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Rp)
1	2014	174.743.449.417,00	174.102.493.436,00	668.031.034.398,87	734.248.247.738,00	4.919.163.063,00	33.057.989.863,00
2	2015	175.781.662.417,00	195.566.309.466,00	734.917.385.035,00	930.973.888.126,00	5.119.280.246,00	20.019.527.963,00

Sumber : DPPKAD Kab Balangan Tahun 2016

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan APBD Kabupaten Balangan sejak Tahun Anggaran 2013 sampai 2015 rata-rata rasio persentase antara total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran hanya sekitar 32 persen seperti dirinci pada tabel 3.2. Hal ini menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Balangan relatif baik dari sisi Belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk Belanja Aparatur tidak mendominasi total pengeluaran dalam APBD.



Tabel 3.2.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)(Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) X 100 %
1	TA 2013	241.925.186.071,00	769.797.309.551,70	31,43
2	TA 2014	271.819.036.433,00	841.281.648.478,50	32,31
3	TA 2015	287.474.130.373,24	891.339.631.015,24	32,25

Sumber: Data Primer diolah.

2.2. Analisis Pembiayaan

Berdasarkan APBD Kabupaten Balangan sejak Tahun Anggaran 2013 sampai 2015 ternyata defisit riil anggaran Kabupaten Balangan dapat ditutup dari SILPA Tahun anggaran sebelumnya. Hal ini diketahui dari rata-rata proporsi SILPA daerah tahun sebelumnya terhadap total defisit riil rata-rata di atas 100 persen, dengan SILPA selalu lebih besar dari total defisit riil. Sedangkan untuk proporsi SILPA daerah tahun sebelumnya terhadap total defisit riil setiap Tahun Anggaran dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015

No	Uraian	2013	2014	2015
A	SURPLUS/ DEFISIT	27,801,173,566.80	-59,515,880,051.45	14,501,507,765.65
B	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
1	Penggunaan SilPA	266,101,697,448.86	218,196,237,808.30	91,145,375,918.35
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	
4	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0	0	
5	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	
6	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0	0	
7	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0	
8	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0	0	
9	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0	0	
10	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah (Koperasi)	150,000,000.00	125,000,000.00	159,375,000.00
11	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	
12	Penerimaan dari Sisa UYHD Tahun Lalu	0	0	
13	Penerimaan Piutang Pihak Ketiga	0	59,819,049.00	

Sumber : Data Primer yang diolah



3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Rata-rata pertumbuhan Belanja Operasi selama tiga Tahun Anggaran terakhir ialah sekitar 20 persen. Dari berbagai komponen Belanja, pertumbuhan rata-rata terbesar disumbangkan oleh Belanja Pegawai dan Belanja Barang serta belanja Hibah di tahun 2015 untuk keperluan Pemilukada. Pertumbuhan rata-rata pertumbuhan negatif dialami oleh Belanja Modal dan Belanja sosial, walaupun tidak secara signifikan.

Untuk belanja bantuan keuangan, sejak tahun 2015 sudah ditiadakan dan dialihkan kepada belanja bantuan keuangan ke desa sesuai dengan regulasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk lebih lengkapnya, data pengeluaran Kabupaten Balangan tiga tahun terakhir disajikan dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Pengeluaran Periodik, Wajib, dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015

NO.	URAIAN	REALISASI		
		2013	2014	2015
A	BELANJA OPERASI			
1	Belanja Pegawai	241,925,186,071.00	271,819,036,433.00	287,474,130,373.24
2	Belanja Barang	150,985,234,130.00	168,473,053,098.00	219,611,011,715.00
3	Belanja Hibah	8,066,125,000.00	9,795,903,400.00	33,172,363,536.00
4	Belanja Bantuan Sosial	2,299,735,000.00	3,373,575,000.00	2,173,575,000.00
5	Belanja Bantuan Keuangan	15,498,920,943.00	19,739,755,208.00	0.00
	Jumlah Belanja Operasi	418,775,201,144.00	473,201,323,139.00	542,431,080,624.24
B	BELANJA MODAL			
1	Tanah	5,157,294,500.00	13,570,474,500.00	385,150,000.00
2	Peralatan dan Mesin	25,372,797,480.00	23,776,329,559.00	31,543,058,775.00
3	Gedung dan Bangunan	103,378,321,930.00	97,140,680,163.00	50,868,410,096.00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	140,701,239,390.00	165,559,777,426.00	208,955,918,515.00
5	Aset Tetap Lainnya	148,321,900.00	205,026,725.00	292,539,200.00
6	Aset Lainnya	0	0	147,686,750.00
	Jumlah Belanja Modal	274,757,975,200.00	300,252,288,373.00	292,192,763,336.00
C	BELANJA TAK TERDUGA			
1	Belanja Tak Terduga	407,500,000.00	153,088,779.00	233,607,855.00
	JUMLAH BELANJA	693,940,676,344.00	773,606,700,291.00	834,857,451,815.24
	TRANSFER			
D	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KE DESA	0	0	107,684,869,882.00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	693,940,676,344.00	773,606,700,291.00	942,542,321,697.24

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk proyeksi lima tahun ke depan, berdasarkan *trend linier* beberapa tahun sebelumnya maka kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Balangan akan terus meningkat dengan *trend* positif. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan daerah Kabupaten Balangan memiliki potensi riil untuk lebih mandiri. Namun terdapat beberapa asumsi yang harus tetap dijaga agar asumsi APBD Kabupaten Balangan tetap sehat, antara lain : asumsi belanja pegawai, asumsi belanja modal, dan Pos Pendapatannya pada komposisi PAD lebih ditingkatkan proporsinya daripada Dana Perimbangan.

Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah Kabupaten Balangan ke depan harus terus dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan dan meningkatkan kapasitas keuangan, baik dari aspek sumber-sumber penerimaan daerah maupun dari aspek pemanfaatan dan pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan kapasitas keuangan ini diarahkan untuk dapat mendanai pelayanan publik berdasarkan Standar Pelayanan Publik (SPM), dan untuk mendukung iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Balangan. Upaya bagi peningkatan kapasitas keuangan juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Kabupaten Balangan dalam mengelola sumber daya daerah dan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, akan terus dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara profesional dan akuntabel, termasuk dalam penggunaan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi. Jelasnya proyeksi kapasitas keuangan daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut.



BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” atau kesenjangan harapan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Capaian kinerja pembangunan di berbagai bidang pada masa sebelumnya telah menghantarkan masyarakat Kabupaten Balangan ke dalam kondisi kehidupan yang semakin baik. Berbagai permasalahan pokok yang muncul pada awal periode pemerintahan sebelumnya telah seoptimalnya diatasi. Hal ini terbukti pada hasil capaian kinerja pembangunan pada akhir periode pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Namun demikian, patut diakui bahwa pembangunan yang sudah dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat pada periode pemerintahan yang lalu masih menyisakan beberapa permasalahan pokok yang mendasar guna mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Balangan yang lebih baik lagi.

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2011-2015, telah membuahkan hasil yang menggembirakan, tetapi tetap menyisakan tugas ke depan, yaitu mengatasi permasalahan-permasalahan pokok yang mendasar di masa datang. Beberapa permasalahan pembangunan mendasar yang dapat diidentifikasi dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Balangan, diantaranya adalah:

- 1) Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia, yang tercermin dari tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2014 pertumbuhan IPM Balangan adalah 0,64. Angka ini lebih besar jika dibandingkan tahun 2013 yakni 0,53 menunjukkan kecepatan pembangunan manusia di Balangan yang cukup baik. Angka pertumbuhan IPM Balangan ini lebih kecil jika dibandingkan provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 0,68. Pada tahun 2014, pertumbuhan IPM Kabupaten Balangan menempati urutan ke-6 tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di provinsi Kalimantan Selatan.
- 2) Terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun 2013 ke tahun 2014. Dimana pada tahun 2013 penduduk miskin di Kabupaten Balangan sebanyak 7.383 jiwa atau sekitar 6,17 % dari total penduduk Balangan Tahun 2013. Pada tahun 2014, jumlah ini meningkat menjadi 7.660 jiwa atau 6,29 persen. Secara umum, terjadinya peningkatan kemiskinan ini dikarenakan adanya penurunan harga karet yang cukup tajam dan ditambah dengan banyaknya pencari kerja yang mirasi dari daerah lain ke Kabupaten Balangan.



- 3) Daya saing produk unggulan Kabupaten Balangan secara umum masih rendah. Hal ini disebabkan rendahnya produktivitas, kualitas, nilai tambah maupun skala ekonomi produk unggulan tersebut.
- 4) Terbatasnya akses masyarakat ke sumber permodalan, penguasaan iptek dan informasi pasar untuk menunjang kegiatan usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, seperti jaringan pengairan dan jaringan jalan pada sentra-sentra produksi.
- 5) Masih belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur (listrik, air bersih, transportasi serta pemukiman dan fasilitas umum) baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga berpengaruh terhadap investasi dan daya dukung untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Balangan.
- 6) Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat yang terkait dengan kinerja birokrasi dan budaya kerja/etos kerja.
- 7) Masih lemahnya penegakan hukum serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, isu-isu strategis harus memenuhi kriteria memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah; merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Isu-isu strategis yang harus dikelola dengan baik dalam perjalanan masyarakat Balangan lima tahun mendatang, yaitu:

- 1) Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, yang didukung dengan prasarana dan sarana serta sumber daya manusia yang memadai.
- 2) Penurunan jumlah penduduk miskin melalui perkuatan basis ekonomi kerakyatan yang mendasarkan diri pada optimalisasi segenap potensi lokal.



- 3) Peningkatan infrastruktur yang memadai untuk memacu pengembangan wilayah
- 4) Perbaikan iklim investasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan investasi swasta
- 5) Pengelolaan sumber daya alam yang optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
- 6) Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang mengacu nilai-nilai *good governance* dan mengedepankan *clear governance* di semua aspek serta peningkatan kompetensi, daya kreasi dan inovasi aparatur pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik
- 7) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna menjaga dan memelihara suasana sosial budaya masyarakat yang kondusif.

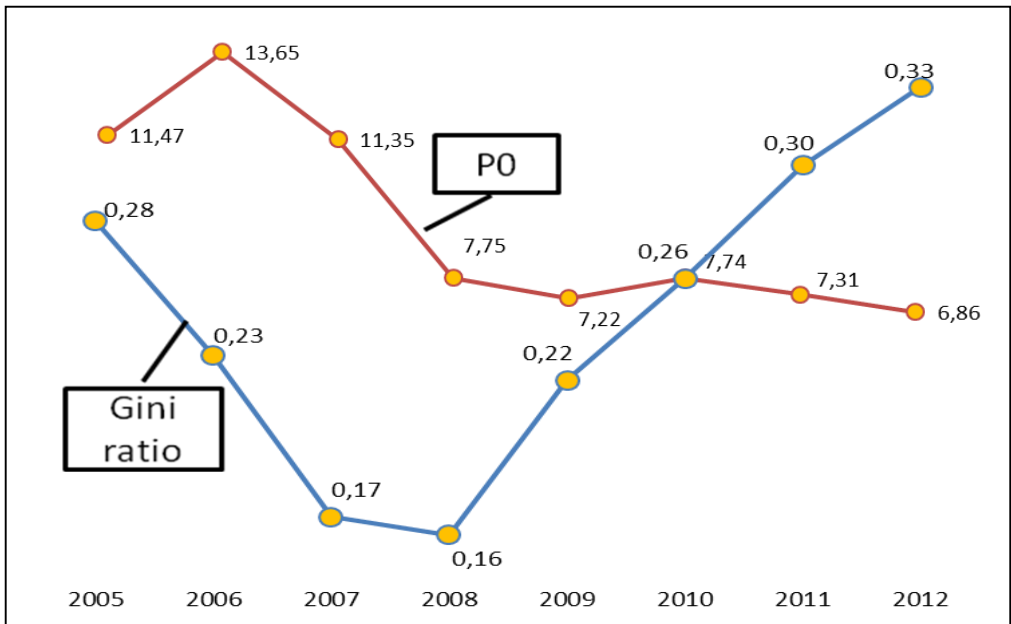
Sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ditunjang tingkat kesehatan yang memadai. Sumber daya manusia, bukan hanya sebagai faktor produksi melainkan ikut berfungsi mengkoordinasi faktor produksi lain dalam kegiatan ekonomi. Karenanya, peningkatan kualitas masyarakat Balangan menjadi faktor penentu dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Balangan dalam lima tahun ke depan harus terfokus pada peningkatan kualitas manusia secara keseluruhan dan memperbaiki kesenjangan kualitas manusia, baik dilihat dari status golongan pendapatan, gender maupun antar wilayah dalam lingkup administrasi pemerintahan Kabupaten Balangan.

Capaian laju pertumbuhan ekonomi selama periode 2011- 2015 yang fluktuatif ternyata tidak signifikan menjawab kebutuhan untuk mewujudkan tujuan masyarakat Kabupaten Balangan yang maju dan sejahtera. Hal ini dikarenakan proporsi distribusi PDRB Kabupaten Balangan hampir 80 persen masih disumbang oleh sektor Pertambangan dan penggalian yang berbanding terbalik dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang hanya berkisar antara 3-5 persen. Di sisi lain, sektor pertanian dengan sumbangan distribusi PDRB yang hanya sekitar 10 persen, tetapi memberikan lapangan kerja terbesar, yaitu mencapai 70 persen. Oleh karena itu, percepatan pertumbuhan ekonomi harus terus menerus dilakukan yang mengikutsertakan sebanyak mungkin masyarakat Balangan (*inclusive growth*). Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga Balangan dalam menghadapi berbagai guncangan ekonomi.

Pengurangan jumlah kemiskinan tidak dapat sepenuhnya hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memerlukan kualitas dari pertumbuhan ekonomi tersebut.



Grafik 4.1 Perkembangan Kemiskinan dan Gini Ratio Balangan



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014

Berdasarkan grafik 4.1 menunjukkan bahwa sejak tahun 2010, terlihat kemiskinan semakin menurun, namun gini ratio semakin tinggi. Ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin tinggi ini merupakan salah satu pertanda bahwa pemerataan pembangunan harus lebih ditingkatkan sehingga dengan sendirinya kualitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara umum akan lebih baik.

Pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Revitalisasi pertanian tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Keluarga miskin tidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur.

Di sisi lain, pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak tepat akan mengakibatkan sumber daya alam menyusut. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Kerusakan lingkungan hidup juga diduga menjadi salah satu penyebab utama munculnya epidemik dan penyakit saluran pernapasan. Dimensi lingkungan hidup pun makin luas berkaitan dengan perubahan iklim yang mempunyai keterkaitan kuat dengan kerusakan lingkungan hidup dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan.

Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Pada saat ini kualitas birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Balangan perlu ditingkatkan terus



menerus untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga dewasa ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan penatakelolaan birokrasi daerah yang disinkronkan dengan kebijakan reformasi birokrasi oleh pemerintah merupakan kunci utama yang harus dilakukan. Penegakan hukum secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi, dapat memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha. Banyak upaya perbaikan sistem hukum yang sudah dibenahi. Namun, kesadaran masyarakat Kabupaten Balangan untuk mentaati fungsi hukum dalam menuntun perilaku berkehidupan masyarakat sehari-hari masih harus ditingkatkan.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Untuk menyikapi permasalahan pembangunan yang masih harus dihadapi di Kabupaten Balangan maka dicanangkanlah Visi Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015 yang merupakan visi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2016–2021, yaitu:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BALANGAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA”

Makna dari Visi tersebut sebagai berikut:

MAJU:

Kabupaten Balangan harus mampu mensejajarkan diri dengan daerah lain yang sudah lebih dahulu maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. **Balangan yang maju** juga berarti roda pemerintahan sudah berjalan secara optimal yang didukung oleh struktur kelembagaan pemerintah daerah yang lengkap dan diisi serta dikelola oleh aparatur yang berkompeten di bidang tugasnya masing-masing, sehingga mampu memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Kemajuan juga tercermin pada tingkat partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pembangunan

SEJAHTERA:

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing daerah, kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi: sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha, rasa aman, didukung oleh infrastruktur yang mantap.

5.2. Misi

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016- 2021, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan;
2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan;
4. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam (potensi daerah) berdasarkan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan;



5. Mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan;
6. Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah;
7. Mewujudkan kamtibmas dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana yang kondusif.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran, di samping menerjemahkan visi/misi dan menjawab permasalahan pembangunan daerah/isu-isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah. Misi, Tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai disebut dengan strategi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Balangan sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:



BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Balangan 2016-2021, kebijakan umum yang ditempuh sebagai berikut:

- a. **Meningkatnya kualitas sumber daya manusia** yang tercermin dari terpenuhinya hak-hak dasar rakyat. Penekanan pembangunan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan berkualitas, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, pengembangan daya saing tenaga kerja Balangan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. **Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.** Untuk mewujudkannya upaya-upaya pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui ekonomi kerakyatan yang diikuti dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai agar mampu mengurangi pengangguran terbuka. Hal tersebut diupayakan dengan melakukan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian dan usaha mikro, kecil dan menengah, yang didukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dan lingkungan usaha yang sehat, termasuk peningkatan investasi dan revitalisasi pertanian dalam arti luas, dan pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian (agroindustri) serta perbaikan iklim ketenagakerjaan.
- c. **Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan** yang ditunjukkan dari meningkatnya kuantitas dan kualitas serta kemanfaatan berbagai infrastruktur dan sarana-prasarana umum.
- d. **Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam (potensi lokal) berdasarkan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan** yang didasari prinsip pembangunan berkelanjutan.
- e. **Mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan** sebagai objek dan subyek pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui seni budaya, olahraga, keagamaan, penanganan kemiskinan dan masalah sosial serta pencegahan dan tanggap darurat bencana;
- f. **Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah** agar dapat berfungsi menjadi fasilitator dalam rangka peningkatan pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) , penyelenggaraan pemerintahan, serta pembangunan menuju kepada good governance dan clear government. Untuk itu, diperlukan regulasi, sistem, dan budaya kerja bagi aparatur pemerintah daerah yang mampu memberikan kepastian hukum, kemudahan bekerja, kesesuaian pekerjaan dengan tingkat kompetensi, kejelasan jenjang karir serta sistem *reward* dan *punishment* yang tepat dan memadai.



- g. **Mewujudkan kemananan ketertiban masyarakat dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana kondisi.** Kebijakan ini terkait dengan upaya meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum di tengah masyarakat serta perlindungan dan pengakuan terhadap status warga Balangan dalam administrasi dan hukum terkait kependudukan.

Program pembangunan daerah adalah program kepala daerah terpilih berupa kumpulan program dan kegiatan prioritas yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran. Program pembangunan daerah lima tahun ke depan tetap terfokus pada prioritas sebagai berikut:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia,
- b. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan.
- c. Pembangunan Infrastruktur,
- d. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam (potensi lokal) berdasarkan kearifan lokal
- e. Mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan
- f. Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah
- g. Mewujudkan kemananan ketertiban masyarakat dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana kondisi

Program dan kegiatan prioritas berdasarkan tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dapat dilihat pada Tabel 7.1



BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Rencana program prioritas diperuntukkan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, untuk melengkapi dan atau menjabarkan program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Identifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh urusan wajib dan pilihan telah memiliki program prioritas sesuai permasalahan pembangunan masing-masing. Indikasi program prioritas jelas menyebutkan SKPD penanggungjawab dan disertai pagu indikatifnya.

Indikasi program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan *terlampir*.

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD yaitu tahun 2021 dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah Kabupaten Balangan secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Indikator kinerja daerah ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Jelasnya mengenai indikator kinerja daerah Kabupaten Balangan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 9.1 berikut.



BAB X

PENUTUP

10.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah Kabupaten Balangan dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022 serta untuk memberikan ruang dan pedoman bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2021 mendatang untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026, maka dalam masa transisi tersebut Pemerintah Daerah dapat menyusun Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 sesuai dengan jadwal dan agenda yang ada untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan daerah yang belum seluruhnya rampung sampai akhir tahun 2021 dan melaksanakan pembangunan daerah Tahun 2021.

Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2021 dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil pemilihan langsung tahun 2020 tetap memiliki ruang gerak yang cukup untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021 yang sudah disusun untuk menjadi acuan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016- 2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Balangan terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan telah dilantik pada tanggal 17 Agustus 2016.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Balangan Tahun 2016- 2021 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk itu perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a) SKPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
- b) SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun;

- c) SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD, dan antara Renstra dan Renja SKPD;
- d) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan 2016–2021 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan daerah dan dukungan dari pihak swasta/dunia usaha serta masyarakat.

Dalam kaitannya dengan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan daerah dengan dukungan swasta/dunia usaha dan masyarakat perlu secara sungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan daerah yang direncanakan, yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar mampu memberikan hasil pembangunan yang optimal dan dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Balangan untuk mewujudkan Balangan yang maju dan sejahtera.

